

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Efektivitas pengelolaan anggaran pada Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun anggaran 2017 - 2019, peneliti menarik simpulan sebagai berikut:

1. Aspek output program, tahun 2017 – 2019 yang mencapai >100% hanya 1 dari 6 indikator. Faktor penghambat adalah terkait komitmen dan keterlambatan pencairan anggaran; sedangkan strategi penetapan indikator dan pencapaian output maksimal dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan program.
2. Aspek Efisiensi terkait capaian output dan data input. Capaian output Direktorat pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik tahun 2017 – 2019 minimal 53%, maksimal 112%, dan rata-rata 89%. Pada data masukan, yaitu PBJ dibanding operasional terendah pada tahun 2019 yaitu 35%. Anggaran bersumber PHLN dibanding APBN tahun 2019 sebesar 0% ternyata kinerja lebih baik. Kurangnya efisiensi berdasarkan temuan BPK RI adalah terkait penatausahaan dan pengelolaan BMN belum memadai dan banyak yang belum selesai proses hibahnya; bendahara PHLN kurang cermat dalam penyajian dan pengelolaan kas dari dana hibah; serta penjelasan pada saldo akun belanja barang dan jasa juga saldo rincian akun belanja modal tidak sesuai atau belum memadai.
3. Aspek Penyelesaian tugas terkait pertanggungjawaban masih ada kendala yaitu pelaksana tidak segera menyelesaikan; dan tidak sesuai petunjuk teknis. Kendala terkait revisi anggaran yaitu frekuensi masih rata - rata 5x dalam 1 periode anggaran, melebihi dari yang disarankan oleh Kemenkeu.

4. Aspek Stabilitas, proses mekanisme pencairan anggaran yaitu yang pertama kelompok substansi (Poksi) mengajukan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kemudian KPA meminta Kepala Sub Administrasi Umum memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Operasional untuk melakukan pencairan anggaran. Pembagian tugas bagian perencanaan anggaran diantaranya ada yang menyiapkan data dukung seperti TOR, spesifikasi, referensi; perhitungan anggaran sesuai Standar Biaya Minimal (SBM) dan menginput ke aplikasi RKA-K/L. Pembagian tugas pengelolaan anggaran pada tiap Poksi terdapat petugas Pemegang Uang Muka (PUM) untuk membantu PPK dan bendahara. Petugas perencanaan dan PUM dilakukan pergantian secara rutin untuk menghindari beban kerja, karena merupakan tugas tambahan. Pergantian petugas bervariasi pada tiap Poksi, antara 1 – 3 tahun. Kendala bila dilakukan pergantian pejabat/ petugas pengelola anggaran terlalu sering, akan menghambat proses pencairan anggaran karena butuh waktu untuk mempelajari dulu dan membutuhkan proses perubahan format/ tanda tangan hingga ke KPPN.
5. Aspek Kepaduan, pada kegiatan integrasi terkait kegiatan pengendalian vektor. Kendala yang terbanyak adalah menyangkut kesepakatan menentukan waktu pelaksanaan kegiatan. Faktor pendukung terbanyak diantaranya adanya kesamaan tujuan dan adanya kerjasama yang baik dan matang.
6. Aspek Keluwesan, adaptasi kegiatan pelaksanaan anggaran bila ada peraturan baru, adalah hal yang mutlak untuk tetap mengikuti aturan atau kebijakan yang berlaku. Kemudian langkah yang diambil dalam penyesuaian adalah melakukan revisi anggaran. Sikap pejabat pengelola anggaran adalah segera menginfokan agar semua dapat mengimplementasikan, karena peraturan berlaku sejak berkas ditandatangani. Kendala yang dihadapi adalah sebagian besar menginfokan bahwa membutuhkan waktu untuk mempelajari dan memahami mekanisme/ metode aturan yang baru tersebut.
7. Aspek Proses internal, untuk skill SDM yang berkompeten dengan tambahan kompetensi di bidang teknologi. Ketersediaan SOP dinyatakan kurang memadai. Monitoring dan evaluasi (monev) atau pengawasan

internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) dilakukan sebagai pendampingan dari awal sejak penyusunan perencanaan. Sedangkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai auditor eksternal/ post audit dari Itjen, hanya mengonfirmasi pelaksanaan anggaran apakah sesuai dengan peraturan atau tidak. Pada tahun 2017 – 2019 pelaksanaan anggaran Direktorat pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik penyerapan tidak mencapai batas optimal. Sebagian besar menyatakan kendalanya terkait PBJ yang gagal proses; tidak terealisasi; dan gagal lelang di akhir tahun sehingga sulit untuk dilaksanakan revisi.

8. Aspek Kesesuaian pelaksanaan anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) serta dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L), hanya sedikit meleset dari RPD yang biasanya disebabkan karena perlu mengikuti jadwal pimpinan/ jadwal daerah; juga karena penyelesaian pertanggungjawaban DIPA akhir tahun periode sebelumnya yang belum tuntas. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan RKA-K/L, kecuali bila ada revisi. Penyusunan RPD dilakukan pada awal tahun berdasarkan prioritas dengan melakukan rapat internal, kemudian menentukan penanggungjawab kegiatan, dan menyusun *time bound action plan*. Kendala ketidaksesuaian dengan RPD ada pada kegagalan proses PBJ, terkait jadwal yang kadang tidak dapat diprediksi menjadi bentrok, dan terkait mekanisme pencairan anggaran yang kurang fleksibel sehingga kadang memakai dana pribadi dulu. Kegiatan penyusunan RKA-K/L pada bagian perencanaan diantaranya menyiapkan data terkait pencapaian indikator program; membuat garis besar kegiatan; membuat Petunjuk Perencanaan; membuat Petunjuk Teknis; membuat Petunjuk Pelaksanaan; membuat TOR; membuat detil kegiatan; menginput ke aplikasi RKA-K/L; menunggu review oleh PI, Biro Perencanaan, Inspektur Jenderal, dan Direktorat Jenderal Anggaran.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti menyampaikan saran yaitu

1. Aspek output program, Melakukan advokasi ke daerah dan Linsek Bersama Kemendagri dan Bappenas terkait komitmen daerah untuk mendukung kegiatan dan anggaran; PPK mempercepat pencairan anggaran; dan memperkuat monitoring dan evaluasi.
2. Aspek efisiensi, pejabat eselon 1 membuat surat edaran terkait percepatan proses penyelesaian hibah BMN; koordinasi PBJ dengan daerah penerima sejak awal; memberi peningkatan kapasitas secara berkelanjutan pada bendahara PHLN tentang cara pengelolaan rekening dana hibah yang baik dan benar; meminimalkan anggaran bersumber PHLN; menempatkan pegawai dengan latar belakang pendidikan akuntansi untuk tugas penyusunan dan pengungkapan Catatan Laporan Keuangan.
3. Aspek penyelesaian tugas, Membuat penelitian internal khususnya analisis data terkait perencanaan yang telah berlalu dan implementasinya, hasilnya dapat menjadi acuan dalam membuat suatu perencanaan kegiatan. Para pemegang kebijakan juga sebaiknya konsisten menjalankan perencanaan awal tanpa banyak kebijakan baru dengan revisi. Membuat majalah dinding yang memuat berita terkait daftar pelaksana yang belum/ lama dalam menyelesaikan pertanggungjawaban.
4. Aspek stabilitas, petugas bagian perencanaan perlu diberikan peningkatan kapasitas antara lain meliputi merencanakan kegiatan dan memperhitungkan anggaran secara berkelanjutan; juga pada PUM. Pergantian petugas perencanaan dan PUM setiap 3 tahun sekali, dan dilakukan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan. Sebaiknya petugas PUM adalah pegawai dengan latar belakang pendidikan ekonomi/ akuntansi (bukan tenaga teknis).
5. Aspek kepaduan, menentukan waktu pelaksanaan kegiatan di awal tahun dimana belum banyak jadwal terbentuk. Membudayakan pendelegasian perwakilan untuk yang hadir.

6. Aspek keluwesan, Kepala Sub Administrasi Umum sesegera mungkin mengumpulkan semua pegawai Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik di lingkungan satuan kerja dalam pertemuan internal, pimpinan saat itu juga memberikan petunjuk arahan, dan membuat SOP sederhana; PPK satu Direktorat Jenderal P2P berkumpul untuk diskusi dan sepakat tentang mekanisme pelaksanaan anggaran.
7. Aspek proses internal, sarana dan prasarana penunjang tugas pengelola anggaran seperti komputer; laptop; printer; mesin ketik elektrik, dan scanner perlu dicukupi sehingga dapat mengerjakan dengan nyaman dan cepat. Menyediakan SOP pengelola anggaran yang memadai secara sederhana dan singkat serta menyosialisasikan secara berkelanjutan. Menyosialisasikan secara berkelanjutan perihal peraturan yang terkait pemeriksaan auditor eksternal.
8. Aspek kesesuaian, PPK membuat mekanisme pencairan anggaran lebih fleksibel; mudah; dan secara digital/ elektronik. Memetakan prioritas dalam *action plan* dan mentaati jadwalnya.
9. Penelitian lebih lanjut dapat mempertimbangkan terkait topik *cost-effectiveness analysis*; faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian outcome tinggi; atau menganalisis perbandingan data antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H. (2014). Publikasi Dokumen Pengelolaan Anggaran pada Website Pemkab/Pemkot di Provinsi Sumatera Barat. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi Yogyakarta*, A7-A12.
- Alimuddin, F., & Damis, H. (2018). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang. *Paradoks Jurnal Ilmu Ekonomi*, 108-120.
- Astuti EP. (2019). Efisiensi dan Efektivitas dalam Upaya Pelayanan Administrasi Akademik. Retrieved from Raden Intan: <http://repository.radenintan.ac.id/5913/3/bab%202.pdf>
- Bank Indonesia. (2021). *Governance dan Stabilitas Sistem Keuangan*. Retrieved from Indonesia Banking School: <http://ibs.ac.id/governance-dan-stabilitas-sistem-keuangan/>
- Binus. (2020). *Perbedaan Arti Kata Efektif dan Efisien*. Retrieved from Binus University: <https://binus.ac.id/knowledge/2020/09/perbedaan-arti-kata-efektif-dan-efisien/>
- Bisma, I. D. G., & Susanto H. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun Anggaran 2003-2007. *Ganec Swara Edisi Khusus Vol.4 No.3*, 75-86.
- BPSDM PU. (2020). *Perencanaan Anggaran yang Baik akan Membuat Pembangunan Infrastruktur Efisien*. Retrieved from PU: <https://bpsdm.pu.go.id/bacaberita-perencanaan-anggaran-yang-baik-akan-membuat-pembangunan-infrastruktur-efisien1>
- BSN. (2020). *Skema Penilaian Kesesuaian*. Retrieved from Badan Standardisasi Nasional: https://www.bsn.go.id/main/bsn/isi_bsn/20349/skema-penilaian-kesesuaian
- Curristine, T. (2005). Performance Information in the Budget Process: Result of the OECD 2005 Questionnaire. *OECD Journal on Budgeting*, 87-131.
- Curtis, P., & Roupas T.A. (2009). Health Care Finance, the Performance of Public Hospitals and Financial Statement Analysis. *European Research Studies*, 199-212.

- DJA. (2014). Dana Bantuan Sosial bukan Alat Bantu Politik. *Warta Anggaran*, 14.
- DPR. (2021, Maret 14). *Puskaji anggaran*. Retrieved from Berkas: <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-1.pdf>
- Hariyati, & Tjahjadi B. (2015). Peran Mediasi Kinerja Proses Internal atas Hubungan Strategi Inovasi dengan Kinerja Keuangan. *Jurnal Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 164-180
- Hidayat, D.R. (2021). Pendahuluan. Retrieved from File UPI: http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BAHASA_ARAB/195204141980021-UDUNG_RAHMAT_HIDAYAT/Materi_Media_Pembelajaran.pdf
- Hidayati, S. et al. (2015). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Pemahaman Penyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Asimetri Informasi terhadap Efektivitas Anggaran SKPD di Pemerintah Kota Mataram. *Jurnal Infestasi Vol. 11, no.1*, 93-111.
- Idris, M. (2021, Maret 1). *Apa itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya*. Retrieved from Kompas: <https://money.kompas.com/read/2021/03/01/233100426/apa-itu-apbn--definisi-fungsi-dan-tujuan-penyusunannya>
- Inayattulloh, M. R., & Siswantoro, D. (2019). The Effect of Budget Management Quality and Internal Audit to Financial Statement Quality in The Ministries and Agencies. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 218-228
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Instruksi Menteri Keuangan*. Retrieved from Gerakan Efisiensi: <https://www.kemenkeu.go.id/transformasi-kelembagaan/gerakan-efisiensi/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Pelaksanaan Anggaran*. Retrieved from Kemenkeu Learning center: <https://klc.kemenkeu.go.id/tag/pelaksanaan-anggaran/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Pengelolaan Kas Negara*. Retrieved from Kemenkeu: <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/layanan/kantor-pusat/pengelolaan-kas-negara/157-layanan/siklus-apbn/1675-perencanaan-dan-penganggaran.html>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peningkatan Kualitas SDM Mampu Menjaga Stabilitas Ekonomi di Tengah Pandemi*. Retrieved from Kemenkeu: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/peningkatan-kualitas-sdm-mampu-menjaga-stabilitas-ekonomi-di-tengah-pandemi/>

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021, Maret 06). *APBN 2019*. Retrieved from Kemenkeu: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *APBN Kita, Kinerja dan Fakta*
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2013). Efisiensi Belum Banyak Diterapkan. Retrieved from Kemenperin: <https://kemenperin.go.id/artikel/8010/Efisiensi-Belum-Banyak-Diterapkan>
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Khusuma, A. (2016). *Perencanaan Anggaran dalam Organisasi*. Retrieved from Bina Integrasi Edukasi: <http://www.integrasi-edukasi.org/perencanaan-anggaran-dalam-organisasi/>
- Khusuma, A. (2016). *Siklus dan Tahapan Pengelolaan Anggaran*. Retrieved from Bina Integrasi Edukasi: <http://www.integrasi-edukasi.org/siklus-dan-tahapan-pengelolaan-anggaran/>
- KPPN Metro. (2021). *Konfirmasi Data Capaian Output*. Retrieved from Daftar Layanan: <http://kppnmetro.org/konfirmasi-data-capaian-output/>
- Kurrohman, T. (2013). Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan yang Berbasis Value for Money di Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol.5, No.1, 1-11.
- Laras, G. S. et al. (2018). Analisis Hasil Penilaian Kinerja Belanja terhadap Realisasi Anggaran pada Unit Kerja di Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2015 s/d 2017. *Seminar Nasional Cendekiawan ke-4*, 1037-1042.
- Menko Luhut. (2019). *Stabilitas adalah Syarat Utama Pertumbuhan Ekonomi*. Retrieved from Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: <https://maritim.go.id/menko-luhut-stabilitas-adalah-syarat-utama-pertumbuhan/>
- Microsoft. (2013). *Menyelesaikan Tugas Alur Kerja*. Retrieved from Sharepoint Server 2013 Enterprise, dalam Microsoft 365: <https://support.microsoft.com/id-id/office/menyelesaikan-tugas-alur-kerja-ec2fed04-f6ca-47eb-b05e-cf855a8fe2eb>
- Muji Prasetyo. (2021). *Perlu ada Keluwesan dalam Sistem Keuangan Desa*. Retrieved from Jatengprov: <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/perlu-ada-keluwes-dalam-sistem-keuangan-desa/>

- Munifa, M. (2017). Analisis Sistem dan Prosedur Penganggaran dalam Peningkatan efektivitas anggaran. *137 eJurnal Katalogis, volume 5 Nomor 7*, 136-146.
- Nurseto, T. (2012). Evaluasi Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sektor Pendidikan Provinsi DIY. *Jurnal Manajemen Pendidikan No.01/ Th VIII/ April*, 67-84
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2019
- Presiden Republik Indonesia. (2021). Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro. Retrieved from Bappenas: <https://www.bappenas.go.id/files/1213/5229/9964/bab-24-pemantapan-stabilitas-ekonomi-makro.pdf>
- Prinada, Y. (2021, Maret 8). *Apa Pengertian, Tujuan, serta Fungsi APBN dan APBD?* Retrieved from tirto.id: <https://tirto.id/apa-pengertian-tujuan-serta-fungsi-apbn-dan-apbd-gaTj>
- Riadi, M. (2020, Mei 9). *Value for Money*. Retrieved from Kajian Pustaka: <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/value-for-money.html#:~:text=Manfaat%20Value%20for%20Money&text=Meningkatkan%20efektivitas%20pelayanan%20publik%2C%20dalam,Meningkatkan%20mutu%20pelayanan%20publik.&text=Meningkatkan%20kesadaran%20akan%20uang%20publik>
- Rismawaty, N., et al. (2017). Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah dalam "Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama" dengan Menggunakan Metode Value for Money pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2)*, 1158-1166.

- Rustini, N. K. A. et al. (2015). Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan Kerja pada Komitmen Organisasi dan Implikasinya pada Kinerja Pengelola Anggaran. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol.2, No.2, 123-129.
- Sari, D. N. (2018). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja. *KINERJA*, 38-43.
- Setiawan, H. (2020). Efektivitas Kegiatan Orientasi Perpustakaan . *Unair*, 1-18.
- Sinaga, E. J. (2016). Analisis Rendahnya Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. *Jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, 261-274.
- Srithongrung, A. (2017). An evaluation of Performance-Based Budget Reform in Asian Countries. *International Journal of Public Administration*, 1-11.
- Sudaryanti, D. (2013). Pengaruh Penganggaran terhadap Kinerja Aparat Pemda Melalui Sistem informasi Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 12 nomor 01*, 11-24.
- Surianti, M., & Dalimunthe, A. R. (2015). The Implementation of Performance Based Budgeting in Public Sector (Indonesia Case: A Literature Review). *Research Journal of Finance and Accounting* , 198-211.
- Syadzy, A. (2017, Maret 16). *Teori Efektivitas*. Retrieved from Bab II Pembahasan Umum: <http://eprints.walisongo.ac.id/7029/3/BAB%20II.pdf>
- Tamasoleng, A. (2015). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Vol.3, No.1*, 97-110.
- Trisugiarto, T. (April 2016). Efektivitas Sistem Informasi Penganggaran Terhadap Pencapaian Kinerja. *JEAM Vol XV*, 16-24.
- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- UNY. (2011, Maret 16). *Efektivitas*. Retrieved from Bab 2, Landasan Teori: <https://eprints.uny.ac.id/16724/6/BAB%20II.pdf>
- U.S. Bureau of Labor Statistics. (2021). *What is output?*. Retrieved from K-12: <https://www.bls.gov/k12/productivity-101/content/what-is-productivity/what-is-output.htm>
- Wahyunni, E. (2016, Maret 16). *Bab II*. Retrieved from Polsri: <http://eprints.polsri.ac.id/3019/3/BAB%20II.pdf>

Yiswa, N. (2019). *Indikator Kinerja Pembangunan Daerah*. Purwakarta:
Bappelitbangda



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Peneliti : Sri Cahyaningrum

Tempat dan Tanggal Lahir : Kudus, 12 April 1975

Alamat Rumah : Green Village Blok 1A no.7 Neroktog – Kota
Tangerang

Nomor Telepon : 089639607580

Email : cahya@cahayamagisterfarma.id

Status Perkawinan : Menikah

Nama Instansi : Kementerian Kesehatan

Alamat Instansi : H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta

Nomor Telepon : (021) 4247608

Jabatan : Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama

Pangkat/ Golongan : Penata Muda Tk. I/ III b

Riwayat Pendidikan : S1 – Kesehatan Masyarakat, Universitas
Indonesia

Riwayat Pekerjaan : Kelompok Substansi Filariasis dan
Kecacingan, Direktorat Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan
Zoonotik, Direktorat Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit (2006-Saat ini)



LAMPIRAN - LAMPIRAN

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Lampiran 1. SURAT IZIN PENELITIAN



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

Jl. Administrasi II Pejompongan, Jakarta Pusat 10260
Telp. 5347085, 5328496, 5326396, Fax. 53651793, 5329996
Email : politeknik@stialan.ac.id, Website : www.stialan.ac.id

Nomor : 669/STIA.1.1/PPS.02.3 Jakarta, 17 Mei 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa
Program Magister Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta

**Yth. Direktur Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik,
Kementerian Kesehatan**

Gedung Adhyatma Blok A lantai 6, Jl. HR. Rasuna Said,
Blok X.5 Kavling 4-9, Jakarta Selatan

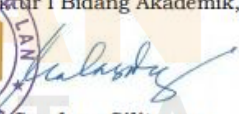
Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Sri Cahyaningrum
NPM : 1963002010
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis : Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Anggaran Direktorat
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan
Zoonotik.

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur
Wakil Direktur I Bidang Akademik,

Mala Sondang Silitonga

Tembusan :
1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Daftar informan

NO	INFORMAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Kelompok Substansi Malaria	1	M1
2	Kelompok Substansi Pengendalian Vektor	1	V1
3	Kelompok Substansi Filariasis dan Kecacingan	2	F1
			F2
4	Kelompok Substansi Zoonosis	1	Z2
5	Kelompok Substansi Arbovirosis	1	A2
6	Sub Administrasi Umum	1	K1
7	Perwakilan Perencanaan anggaran	1	P1
8	Perwakilan Pemegang Uang Muka (PUM) anggaran	2	Pu1
			Pu2
9	Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	1	B1
10	Perwakilan Non-Government Organization (NGO)	1	N1
11	Perwakilan akademisi	1	Ak1

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

KONSEP KUNCI	ASPEK	JENIS DATA YANG DIBUTUHKAN	SUMBER DATA	INSTRUMEN PENELITIAN
Kinerja pengelolaan anggaran Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik	Output program	Capaian output	M1, V1, F1, F2, Z2, A2, K1, Pu1, Pu2	Peneliti observasi, dan telaah dokumen
	Efisiensi	Capaian output dan data input	B1	Peneliti mewawancarai, observasi, dan telaah dokumen
	Penyelesaian tugas	Waktu dalam pelaksanaan kegiatan dengan pertanggungjawaban, dan penyediaan data/ laporan anggaran saat diminta pihak terkait.	K1, Pu1, Pu2, B1	Peneliti mewawancarai, observasi, dan telaah dokumen
		Revisi anggaran	K1	Peneliti mewawancarai, observasi, dan telaah dokumen
	Stabilitas	Kegiatan peningkatan kapasitas	P1, Pu1, Pu2	Peneliti mewawancarai telaah dokumen, dan observasi
		Struktur organisasi tugas/ pejabat/ pengelola anggaran dari waktu ke waktu	M1, V1, F1, F2, Z2, A2, K1, P1, Pu1, Pu2	Peneliti mewawancarai dan observasi

	Kepaduan	Bentuk integrasi	M1, V1, F1, F2, Z2, A2, K1, P1, Pu1, Pu2	Peneliti mewawancara, observasi, dan telaah dokumen
		iHubungan iantara Direktoratipencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik idengan ibagian iProgram idan iInformasi, iBiro iPerencanaan, imasyarakat, ipara iahli, iserta iakademisi	Ak1	Peneliti mewawancara, observasi, dan telaah dokumen
	Keluwes	Adaptasi terhadap peraturan dan perubahan kebijakan	M1, V1, F1, F2, Z2, A2, K1, P1, Pu1, Pu2, N1,	Peneliti mewawancara, observasi, dan telaah dokumen
	Proses internal	Input (pengelola yang terampil, perangkat komputer yang berfungsi baik, Standard Operating Procedure (SOP)) yang tersedia	P1, Pu1, Pu2	Peneliti mewawancara dan observasi
		Monitoring dan evaluasi internal dan BPK	B1, M1, V1, F1, F2, Z2, A2, K1	Peneliti mewawancara, observasi, dan telaah dokumen
		Jumlah anggaran, dan realisasi	M1, V1, F1, F2, Z2, A2, K1, Pu1, Pu2	Peneliti observasi, dan telaah dokumen

	Kesesuaian	Rencana iPenarikan iDana i(RPD)	M1, V1, F1, F2, Z2, A2, Pu1, Pu2	Peneliti mewawancara, observasi, dan telaah dokumen
		Dokumen iRencana iKerja idan iAnggaran Kementerian/ iLembaga i(RKA-iK/L)	K1, P1, Pu1, Pu2	Peneliti mewawancara, observasi, dan telaah dokumen

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Informan : M1
 Satuan Kerja : Kelompok Substansi Malaria

No	Pertanyaan
	Output Program
	a. Apa faktor pendukung keberhasilan Kelompok substansi Malaria untuk capaian output tahun 2017 sebesar 110,67%? b. Apa faktor pendukung keberhasilan Kelompok substansi Malaria untuk capaian output tahun 2018 sebesar 117,95%? c. Apa faktor pendukung keberhasilan Kelompok substansi Malaria untuk capaian output tahun 2019 sebesar 116%?
	Stabilitas
	a. Bagaimana pembagian tugas pengelola anggaran di Kelompok substansi nya? b. Apakah pengelola anggaran tetap atau berubah dari tahun ke tahun? c. Apa saja kendala bila pejabat pengelola anggaran sering berganti?
	Kepaduan
	a. Apa saja kegiatan integrasi dengan kelompok substansi lainnya? b. Apa saja kendala dalam pelaksanaannya? c. Apa faktor pendukung keberhasilan kegiatan integrasi?
	Keluwesasan
	a. Bagaimana adaptasi kegiatan pelaksanaan anggaran bila ada peraturan/ kebijakan baru? b. Bagaimana sikap pejabat pengelola anggaran untuk beradaptasi? c. Apa saja kendala dalam beradaptasi?
	Proses Internal
	Monitoring dan Evaluasi Internal dan BPK a. Bagaimana monitoring dan evaluasi Inspektorat Jenderal? b. Bagaimana monitoring dan evaluasi BPK? c. Apakah monitoring dan evaluasi tersebut bersifat mendidik atau mencari kesalahan untuk menghukum?
	Jumlah anggaran dan realisasi a. Pagu anggaran tahun 2017 sebesar 109 M, tahun 2018 sebesar 130 M dan tahun 2019 sebesar 83 M, berapa kira-kira persentase APBN dengan PHLN? b. Bagaimana alokasi anggarannya? (perkiraan besaran persentase dekon dengan pusat) c. Apa saja kendala sehingga anggaran tahun 2019 turun? d. Apa saja kendala realisasi rendah pada tahun 2018 yaitu 68.35%?
	Kesesuaian
	a. Bagaimana penyusunan RPD? b. Apakah kegiatan terlaksana sesuai dengan RPD yang dibuat? c. Apa saja kendala bila pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan RPD?

Informan : K1
 Satuan Kerja : Sub Administrasi Umum

No	Pertanyaan
	Output Program
	a. Bagaimana bentuk dorongan/ dukungan direktorat agar capaian output program para kelompok substansi tinggi? b. Seberapa besar target capaian output program minimal yang diharapkan dari para kelompok substansi? c. Apa saja biasanya kendala capaian output program bila kurang dari target?
	Penyelesaian Tugas
	<i>Waktu dalam pelaksanaan kegiatan dengan pertanggungjawaban, dan penyediaan data/ laporan anggaran saat diminta pihak terkait.</i> a. Bagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tiap kelompok substansi? b. Bagaimana penyediaan data/ laporan anggaran tiap kelompok substansi bila diminta direktorat, PI, dll? c. Apa saja kendala direktorat terkait pertanggungjawaban/ penyediaan data/laporan anggaran tiap kelompok substansi?
	<i>Revisi anggaran.</i> a. Berapa ketentuan frekuensi revisi anggaran? b. Rata-rata frekuensi revisi anggaran tiap kelompok substansi berapa kali dalam 1 tahun? c. Butuh waktu berapa lama biasanya pelaksanaan revisi anggaran untuk dapat melaksanakan anggarannya?
	Stabilitas
	a. Bagaimana pembagian tugas pengelola anggaran? b. Apakah pengelola anggaran tetap atau berubah dari tahun ke tahun? c. Apa saja kendala bila pejabat pengelola anggaran sering berganti?
	Kepaduan
	a. Apa saja bentuk kegiatan integrasi? b. Apa saja kendala dalam pelaksanaannya? c. Apa faktor pendukung keberhasilan kegiatan integrasi?
	Keluwesasan
	a. Bagaimana adaptasi kegiatan pelaksanaan anggaran bila ada peraturan/ kebijakan baru? b. Bagaimana sikap pejabat pengelola anggaran untuk beradaptasi? c. Apa saja kendala dalam beradaptasi?
	Proses Internal
	Monitoring dan Evaluasi Internal dan BPK a. Bagaimana monitoring dan evaluasi Inspektorat Jenderal? b. Bagaimana monitoring dan evaluasi BPK? c. Apakah monitoring dan evaluasi tersebut bersifat mendidik atau mencari kesalahan untuk menghukum?

	Jumlah anggaran dan realisasi a. Berapa minimal realisasi anggaran yang dianggap bagus/ efisien? b. Bagaimana dukungan direktorat agar realisasi anggaran tiap kelompok substansi tinggi? c. Apa saja kendala bila realisasi anggaran rendah?
	Kesesuaian a. Bagaimana pelaksanaan RKA-KL tiap kelompok substansi? b. Bagaimana kesesuaian pertanggungjawaban dengan RKA-K/L tiap kelompok substansi? c. Apa saja kendala pelaksanaan akun-akun RKA-K/L?

Informan : P1
Satuan Kerja : Perwakilan Perencanaan Anggaran

No	Pertanyaan
	Stabilitas Peningkatan kapasitas a. Bagaimana peningkatan kapasitas bagian perencanaan anggaran di Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik? b. Hal apa saja yang dirasa masih sulit dalam menjalankan tugas sebagai perencana? c. Hal apa saja yang belum sesuai dengan prosedur dalam perencanaan anggaran Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik?
	Struktur organisasi tugas/ pejabat/ pengelola anggaran dari waktu ke waktu a. Bagaimana pembagian tugas perencanaan anggaran? b. Apakah petugas tetap atau berubah dari tahun ke tahun? c. Apa saja kendala perencanaan bila pejabat perencanaan sering berganti?
	Kepaduan
	Bentuk Integrasi a. Apa saja bentuk kegiatan integrasi perencanaan? b. Apa saja kendala dalam pelaksanaannya? c. Apa faktor pendukung keberhasilan kegiatan integrasi?
	Keluwesasan a. Bagaimana adaptasi kegiatan perencanaan anggaran bila ada peraturan/ kebijakan baru? b. Bagaimana sikap pejabat perencanaan anggaran untuk beradaptasi? c. Apa saja kendala dalam beradaptasi?
	Proses Internal

	Input (SDM terampil, perangkat komputer yang berfungsi baik, Standard Operating Procedure (SOP)) yang tersedia a. Bagaimana skill SDM bagian perencanaan? b. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana penunjang tugas perencanaan? c. Apakah SOP tersedia dan memadai?
	Kesesuaian
	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L) a. Bagaimana proses perencanaan hingga menjadi RKA-KL? b. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan RKA-K/L? c. Apa saja kendala perencanaan RKA-K/L?

Informan : V1
Satuan Kerja : Kelompok Substansi Pengendalian Vektor

No	Pertanyaan
	Output Program
	a. Apa faktor pendukung keberhasilan Kelompok substansi Pengendalian Vektor untuk capaian output tahun 2017 sebesar 101.3%? b. Apa faktor pendukung keberhasilan Kelompok substansi Pengendalian Vektor untuk capaian output tahun 2018 sebesar 102.56%? c. Apa faktor pendukung keberhasilan Kelompok substansi Pengendalian Vektor untuk capaian output tahun 2019 sebesar 110.9%?
	Stabilitas
	a. Bagaimana pembagian tugas pengelola anggaran di Kelompok substansi nya? b. Apakah pengelola anggaran tetap atau berubah dari tahun ke tahun? c. Apa saja kendala bila pejabat pengelola anggaran sering berganti?
	Kepaduan
	a. Apa saja kegiatan integrasi dengan kelompok substansi lainnya? b. Apa saja kendala dalam pelaksanaannya? c. Apa faktor pendukung keberhasilan kegiatan integrasi?
	Keluwesn
	a. Bagaimana adaptasi kegiatan pelaksanaan anggaran bila ada peraturan/ kebijakan baru? b. Bagaimana sikap pejabat pengelola anggaran untuk mengimplementasikannya? c. Apa saja kendala dalam implementasi?
	Proses Internal
	Monitoring dan Evaluasi Internal dan BPK a. Bagaimana monitoring dan evaluasi Inspektorat Jenderal? b. Bagaimana monitoring dan evaluasi BPK? c. Apakah monitoring dan evaluasi tersebut terkesan mendidik atau mencari kesalahan untuk menghukum atau bagaimana?

	Jumlah anggaran dan realisasi a. Pagu anggaran tahun 2017 sebesar 28 M, tahun 2018 sebesar 3.4 M dan tahun 2019 sebesar 13 M, berapa kisaran persentase anggaran bersumber APBN dibanding PHLN? b. Bagaimana kisaran perbandingan alokasi anggaran untuk operasional dibanding pengadaan barang dan jasa? c. Bagaimana dasar penetapan sehingga pagu anggaran turun dan naik secara drastis? d. Apa saja kendala realisasi rendah pada tahun 2017 yaitu 52.77%?
	Kesesuaian a. Bagaimana penyusunan RPD? b. Apakah kegiatan terlaksana sesuai dengan RPD yang dibuat? c. Apa saja kendala bila pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan RPD?

Informan : F1
Satuan Kerja : Kelompok Substansi Filariasis dan Kecacingan

No	Pertanyaan
	Output Program Keberhasilan Kelompok substansi Filariasis dan Kecacingan dalam capaian output tahun 2017 sebesar 108.57% dan 140% tahun 2018 sebesar 104.80% dan 158.46% serta tahun 2019 sebesar 102.61% dan 152% a. Mengapa tren capaian indikator jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi < 1% lebih besar dibanding capaian indikator jumlah kabupaten/ kota endemis yang melakukan POPM filariasis? b. Bagaimana strategi penetapan indikator? c. Apa faktor pendukung keberhasilan capaian indikator tinggi?
	Stabilitas a. Bagaimana pembagian tugas pengelola anggaran di Kelompok substansi nya? b. Apakah pengelola anggaran tetap atau berubah dari tahun ke tahun? c. Apa saja kendala bila pejabat pengelola anggaran sering berganti?
	Kepaduan a. Apa saja kegiatan integrasi dengan kelompok substansi lainnya? b. Apa saja kendala dalam pelaksanaannya? c. Apa faktor pendukung keberhasilan kegiatan integrasi?
	Keluwesasan

	a. Bagaimana adaptasi kegiatan pelaksanaan anggaran bila ada peraturan/ kebijakan baru? b. Bagaimana sikap pejabat pengelola anggaran untuk mengimplementasikannya? c. Apa saja kendala dalam implementasi?
	Proses Internal
	Monitoring dan Evaluasi Internal dan BPK a. Bagaimana monitoring dan evaluasi Inspektorat Jenderal? b. Bagaimana monitoring dan evaluasi BPK? c. Apakah monitoring dan evaluasi tersebut terkesan mendidik atau mencari kesalahan untuk menghukum atau bagaimana?
	Jumlah anggaran dan realisasi a. Pagu anggaran tahun 2017 sebesar 27 M, tahun 2018 sebesar 66 M dan tahun 2019 sebesar 22 M, berapa kisaran persentase anggaran bersumber APBN dibanding PHLN? b. Bagaimana kisaran perbandingan alokasi anggaran untuk operasional dibanding pengadaan barang dan jasa? c. Bagaimana dasar penetapan sehingga pagu anggaran turun dan naik secara drastis? d. Apa saja kendala realisasi rendah pada tahun 2018 yaitu 78.70%?
	Kesesuaian
	a. Bagaimana penyusunan RPD? b. Apakah kegiatan terlaksana sesuai dengan RPD yang dibuat? c. Apa saja kendala bila pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan RPD?

Informan : F2
Satuan Kerja : Kelompok Substansi Filariasis dan Kecacingan

No	Pertanyaan
	Output Program
	Keberhasilan Kelompok substansi Filariasis dan Kecacingan dalam capaian output tahun 2017 sebesar 108.57% dan 140% tahun 2018 sebesar 104.80% dan 158.46% serta tahun 2019 sebesar 102.61% dan 152% a. Mengapa tren capaian indikator jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi < 1% lebih besar dibanding capaian indikator jumlah kabupaten/ kota endemis yang melakukan POPM filariasis? b. Bagaimana strategi penetapan indikator? c. Apa faktor pendukung keberhasilan capaian indikator tinggi?
	Stabilitas
	a. Bagaimana pembagian tugas pengelola anggaran di Kelompok substansi nya? b. Apakah pengelola anggaran tetap atau berubah dari tahun ke tahun? c. Apa saja kendala bila pejabat pengelola anggaran sering berganti?
	Kepaduan

	a. Apa saja kegiatan integrasi dengan kelompok substansi lainnya? b. Apa saja kendala dalam pelaksanaannya? c. Apa faktor pendukung keberhasilan kegiatan integrasi?
	Keluwesasan
	a. Bagaimana adaptasi kegiatan pelaksanaan anggaran bila ada peraturan/ kebijakan baru? b. Bagaimana sikap pejabat pengelola anggaran untuk mengimplementasikannya? c. Apa saja kendala dalam implementasi?
	Proses Internal
	Monitoring dan Evaluasi Internal dan BPK a. Bagaimana monitoring dan evaluasi Inspektorat Jenderal? b. Bagaimana monitoring dan evaluasi BPK? c. Apakah monitoring dan evaluasi tersebut terkesan mendidik atau mencari kesalahan untuk menghukum atau bagaimana?
	Jumlah anggaran dan realisasi a. Pagu anggaran tahun 2017 sebesar 27 M, tahun 2018 sebesar 66 M dan tahun 2019 sebesar 22 M, berapa kisaran persentase anggaran bersumber APBN dibanding PHLN? b. Bagaimana kisaran perbandingan alokasi anggaran untuk operasional dibanding pengadaan barang dan jasa? c. Bagaimana dasar penetapan sehingga pagu anggaran turun dan naik secara drastis? d. Apa saja kendala realisasi rendah pada tahun 2018 yaitu 78.70%?
	Kesesuaian
	a. Bagaimana penyusunan RPD? b. Apakah kegiatan terlaksana sesuai dengan RPD yang dibuat? c. Apa saja kendala bila pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan RPD?

Informan : Z2
Satuan Kerja : Kelompok Substansi Zoonosis

No	Pertanyaan
	Output Program
	Keberhasilan Kelompok substansi Zoonosis dalam capaian output tahun 2017 sebesar 100% tahun 2018 sebesar 100.71% dan tahun 2019 sebesar 87.76% a. Mengapa capaian indikator program tahun 2019 rendah? b. Apa saja faktor penghambat pencapaian indikator? c. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan anggaran mempengaruhi pencapaian indikator?
	Stabilitas

	a. Bagaimana pembagian tugas pengelola anggaran di Kelompok substansi nya? b. Apakah pengelola anggaran tetap atau berubah dari tahun ke tahun? c. Apa saja kendala bila pejabat pengelola anggaran sering berganti?
	Kepaduan
	a. Apa saja kegiatan integrasi dengan kelompok substansi lainnya? b. Apa saja kendala dalam pelaksanaannya? c. Apa faktor pendukung keberhasilan kegiatan integrasi?
	Keluwes
	a. Bagaimana adaptasi kegiatan pelaksanaan anggaran bila ada peraturan/ kebijakan baru? b. Bagaimana sikap pejabat pengelola anggaran untuk mengimplementasikannya? c. Apa saja kendala dalam implementasi?
	Proses Internal
	Monitoring dan Evaluasi Internal dan BPK a. Bagaimana monitoring dan evaluasi Inspektorat Jenderal? b. Bagaimana monitoring dan evaluasi BPK? c. Apakah monitoring dan evaluasi tersebut terkesan mendidik atau mencari kesalahan untuk menghukum atau bagaimana?
	Jumlah anggaran dan realisasi a. Pagu anggaran tahun 2017 sebesar 24 M, tahun 2018 sebesar 8 M dan tahun 2019 sebesar 6 M, berapa kisaran persentase anggaran bersumber APBN dibanding PHLN? b. Bagaimana kisaran perbandingan alokasi anggaran untuk operasional dibanding pengadaan barang dan jasa? c. Bagaimana dasar penetapan sehingga pagu anggaran turun secara drastis? d. Apa saja kendala realisasi rendah pada tahun 2017 yaitu 81.25%?
	Kesesuaian
	a. Bagaimana penyusunan RPD? b. Apakah kegiatan terlaksana sesuai dengan RPD yang dibuat? c. Apa saja kendala bila pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan RPD?

Informan : A2
 Satuan Kerja : Kelompok Substansi Arbovirosis

No	Pertanyaan
	Output Program
	Keberhasilan Kelompok substansi Arbovirosis dalam capaian output tahun 2017 sebesar 130.72% tahun 2018 sebesar 122.62% dan tahun 2019 sebesar 93.84% a. Mengapa capaian indikator program tahun 2019 rendah? b. Apa saja faktor penghambat pencapaian indikator? c. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan anggaran mempengaruhi pencapaian indikator?
	Stabilitas
	a. Bagaimana pembagian tugas pengelola anggaran di Kelompok substansi nya? b. Apakah pengelola anggaran tetap atau berubah dari tahun ke tahun? c. Apa saja kendala bila pejabat pengelola anggaran sering berganti?
	Kepaduan
	a. Apa saja kegiatan integrasi dengan kelompok substansi lainnya? b. Apa saja kendala dalam pelaksanaannya? c. Apa faktor pendukung keberhasilan kegiatan integrasi?
	Keluwesasan
	a. Bagaimana adaptasi kegiatan pelaksanaan anggaran bila ada peraturan/ kebijakan baru? b. Bagaimana sikap pejabat pengelola anggaran untuk mengimplementasikannya? c. Apa saja kendala dalam implementasi?
	Proses Internal
	Monitoring dan Evaluasi Internal dan BPK a. Bagaimana monitoring dan evaluasi Inspektorat Jenderal? b. Bagaimana monitoring dan evaluasi BPK? c. Apakah monitoring dan evaluasi tersebut terkesan mendidik atau mencari kesalahan untuk menghukum atau bagaimana?
	Jumlah anggaran dan realisasi a. Pagu anggaran tahun 2017 sebesar 22 M, tahun 2018 sebesar 5 M dan tahun 2019 sebesar 6 M, berapa kisaran persentase anggaran bersumber APBN dibanding PHLN? b. Bagaimana kisaran perbandingan alokasi anggaran untuk operasional dibanding pengadaan barang dan jasa? c. Bagaimana dasar penetapan sehingga pagu anggaran turun secara drastis? d. Apa saja kendala realisasi rendah pada tahun 2018 yaitu 85.99% dan tahun 2017 yaitu 87.30%?
	Kesesuaian
	a. Bagaimana penyusunan RPD? b. Apakah kegiatan terlaksana sesuai dengan RPD yang dibuat? c. Apa saja kendala bila pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan RPD?

Informan : Pu1
 Satuan Kerja : Perwakilan PUM

No	Pertanyaan
	Output Program
	Keberhasilan Kelompok substansi Filariasis dan Kecacingan dalam capaian output tahun 2017 sebesar 108.57% dan 140% tahun 2018 sebesar 104.80% dan 158.46% serta tahun 2019 sebesar 102.61% dan 152% a. Mengapa tren capaian indikator jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi < 1% lebih besar dibanding capaian indikator jumlah kabupaten/ kota endemis yang melakukan POPM filariasis? b. Bagaimana strategi penetapan indikator? c. Apa faktor pendukung keberhasilan capaian indikator tinggi?
	Penyelesaian Tugas
	Waktu dalam pelaksanaan kegiatan dengan pertanggungjawaban, dan penyediaan data/ laporan anggaran saat diminta pihak terkait. a. Bagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran? b. Bagaimana penyediaan data/ laporan anggaran bila diminta direktorat, PI, dll? c. Apa saja kendala direktorat terkait pertanggungjawaban/ penyediaan data/laporan anggaran?
	Stabilitas
	Peningkatan kapasitas a. Bagaimana peningkatan kapasitas bagian PUM anggaran di Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik? b. Hal apa saja yang dirasa masih sulit dalam menjalankan tugas sebagai PUM? c. Hal apa saja yang belum sesuai dengan prosedur dalam PUM anggaran Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik?
	Struktur organisasi tugas/ pejabat/ pengelola anggaran dari waktu ke waktu a. Bagaimana pembagian tugas pengelola anggaran di Kelompok substansi nya? b. Apakah pengelola anggaran tetap atau berubah dari tahun ke tahun? c. Apa saja kendala bila pejabat pengelola anggaran sering berganti?
	Kepaduan
	Bentuk Integrasi a. Apa saja kegiatan integrasi dengan kelompok substansi lainnya? b. Apa saja kendala dalam pelaksanaannya? c. Apa faktor pendukung keberhasilan kegiatan integrasi?
	Keluwesasan
	a. Bagaimana adaptasi kegiatan pelaksanaan anggaran bila ada peraturan/ kebijakan baru? b. Bagaimana sikap pejabat pengelola anggaran untuk mengimplementasikannya? c. Apa saja kendala dalam implementasi?

	Proses Internal
	Input (SDM terampil, perangkat komputer yang berfungsi baik, Standard Operating Procedure (SOP)) yang tersedia a. Bagaimana skill SDM bagian PUM? b. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana penunjang tugas PUM? c. Apakah SOP tersedia dan memadai?
	Jumlah anggaran dan realisasi a. Pagu anggaran tahun 2017 sebesar 27 M, tahun 2018 sebesar 66 M dan tahun 2019 sebesar 22 M, berapa kisaran persentase anggaran bersumber APBN dibanding PHLN? b. Bagaimana kisaran perbandingan alokasi anggaran untuk operasional dibanding pengadaan barang dan jasa? c. Bagaimana dasar penetapan sehingga pagu anggaran turun dan naik secara drastis? e. Apa saja kendala realisasi rendah pada tahun 2018 yaitu 78.70%?
	Kesesuaian
	Rencana Penarikan Dana a. Bagaimana penyusunan RPD? b. Apakah kegiatan terlaksana sesuai dengan RPD yang dibuat? c. Apa saja kendala bila pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan RPD?
	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L) a. Bagaimana proses perencanaan hingga menjadi RKA-KL? b. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan RKA-K/L? c. Apa saja kendala perencanaan RKA-K/L?

Informan : Pu2
 Satuan Kerja : Perwakilan PUM

No	Pertanyaan
	Output Program
	Keberhasilan Kelompok substansi Arbovirosis dalam capaian output tahun 2017 sebesar 130.72% tahun 2018 sebesar 122.62% dan tahun 2019 sebesar 93.84% a. Mengapa capaian indikator program tahun 2019 rendah? b. Apa saja faktor penghambat pencapaian indikator? c. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan anggaran mempengaruhi pencapaian indikator?
	Penyelesaian Tugas

	Waktu dalam pelaksanaan kegiatan dengan pertanggungjawaban, dan penyediaan data/ laporan anggaran saat diminta pihak terkait. a. Bagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran? b. Bagaimana penyediaan data/ laporan anggaran bila diminta direktorat, PI, dll? c. Apa saja kendala direktorat terkait pertanggungjawaban/ penyediaan data/laporan anggaran?
	Stabilitas
	Peningkatan kapasitas a. Bagaimana peningkatan kapasitas bagian PUM anggaran di Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik? b. Hal apa saja yang dirasa masih sulit dalam menjalankan tugas sebagai PUM? c. Hal apa saja yang belum sesuai dengan prosedur dalam PUM anggaran Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik?
	Struktur organisasi tugas/ pejabat/ pengelola anggaran dari waktu ke waktu a. Bagaimana pembagian tugas pengelola anggaran di Kelompok substansi nya? b. Apakah pengelola anggaran tetap atau berubah dari tahun ke tahun? c. Apa saja kendala bila pejabat pengelola anggaran sering berganti?
	Kepaduan
	Bentuk Integrasi a. Apa saja kegiatan integrasi dengan kelompok substansi lainnya? b. Apa saja kendala dalam pelaksanaannya? c. Apa faktor pendukung keberhasilan kegiatan integrasi?
	Keluwesasan
	a. Bagaimana adaptasi kegiatan pelaksanaan anggaran bila ada peraturan/ kebijakan baru? b. Bagaimana sikap pejabat pengelola anggaran untuk mengimplementasikannya? c. Apa saja kendala dalam implementasi?
	Proses Internal
	Input (SDM terampil, perangkat komputer yang berfungsi baik, Standard Operating Procedure (SOP)) yang tersedia a. Bagaimana skill SDM bagian PUM? b. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana penunjang tugas PUM? c. Apakah SOP tersedia dan memadai?
	Jumlah anggaran dan realisasi a. Pagu anggaran tahun 2017 sebesar 22 M, tahun 2018 sebesar 5 M dan tahun 2019 sebesar 6 M, berapa kisaran persentase anggaran bersumber APBN dibanding PHLN? b. Bagaimana kisaran perbandingan alokasi anggaran untuk operasional dibanding pengadaan barang dan jasa? c. Bagaimana dasar penetapan sehingga pagu anggaran turun secara drastis? d. Apa saja kendala realisasi rendah pada tahun 2018 yaitu 85.99% dan tahun 2017 yaitu 87.30%?
	Kesesuaian

	Rencana Penarikan Dana a. Bagaimana penyusunan RPD? b. Apakah kegiatan terlaksana sesuai dengan RPD yang dibuat? c. Apa saja kendala bila pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan RPD?
	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L) a. Bagaimana proses perencanaan hingga menjadi RKA-K/L? b. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan RKA-K/L? c. Apa saja kendala perencanaan RKA-K/L?

Informan : B1
Satuan Kerja : Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

No	Pertanyaan
	Efisiensi
	Capaian Output dan Input. a. Berapa persentase perkiraan capaian pengelolaan anggaran dalam memenuhi input program? b. Bagaimana kuantitas dan kualitas input kementerian terkait PBJ? c. Berapa persentase output dikategorikan baik?
	Penyelesaian Tugas
	Waktu dalam pelaksanaan kegiatan dengan pertanggungjawaban, dan penyediaan data/ laporan anggaran saat diminta pihak terkait. a. Bagaimana penilaian terhadap pertanggungjawaban anggaran kementerian? b. Bagaimana kesiapan penyediaan data/ laporan anggaran Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik? c. Apa saja ketidaksesuaian Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik dalam penyediaan data/ laporan anggaran?
	Proses Internal
	Monitoring dan Evaluasi Internal dan BPK a. Bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi Inspektorat Jenderal? b. Bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi BPK? c. Apakah monitoring dan evaluasi tersebut sebelumnya ada petunjuk teknis, sosialisasi, dll?

Informan : N1
 Satuan Kerja : Perwakilan Non-Government Organization (NGO)

No	Pertanyaan
	Keluwesasan
	Adaptasi a. Bagaimana sosialisasi peraturan/ kebijakan baru terkait pelaksanaan anggaran? b. Bagaimana respon NGO dalam mengimplementasikannya? c. Apa saja kendala dalam implementasinya?

Informan : Ak1
 Satuan Kerja : Perwakilan Akademisi

No	Pertanyaan
	Kepaduan
	Hubungan antara Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik dengan masyarakat a. Apa saja keterkaitan kegiatan antara Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik dengan akademisi? b. Seberapa sering akademisi dilibatkan dalam kegiatan program? c. Kendala apa saja yang dihadapi dalam membuat keterpaduan?

POLITEKNIK
STIA LAN
 J A K A R T A

Lampiran 3. Pedoman Telaah Dokumen

NO	DOKUMEN
1	Laporan Kinerja Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik tahun 2017
2	Laporan Kinerja Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik tahun 2018
3	Laporan Kinerja Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik tahun 2019
4	RKA-K/L satuan kerja Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik tahun anggaran 2017
5	RKA-K/L satuan kerja Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik tahun anggaran 2018
6	RKA-K/L satuan kerja Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik tahun anggaran 2019
7	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2019
8	Laporan Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2017
9	Laporan Tahunan Kelompok Substansi Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit tahun 2018
10	Laporan Tahunan Kelompok Substansi Filariasis dan Kecacingan tahun 2018
11	Laporan Tahunan Kelompok Substansi Filariasis dan Kecacingan tahun 2019

Lampiran 4. Rencana Time Table Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Pencarian judul																						
	Pengajuan judul																						
2	Penyusunan proposal																						
	Permasalahan penelitian																						
	Kerangka teori																						
3	Metodologi penelitian																						
	Revisi proposal																						
	Final proposal																						
	Seminar proposal																						
	Perbaikan proposal																						
	Pengajuan izin penelitian																						
	Pengumpulan data																						
	Analisis data																						
4	Pencarian literatur																						
	Hasil penelitian																						
	Simpulan dan saran																						
	Final laporan																						
5	Pendaftaran seminar hasil																						
	Seminar hasil																						
	Perbaikan seminar hasil																						
	Pendaftaran siding tesis																						
	Sidang tesis																						
	Perbaikan tesis																						

Lampiran 5. Transkrip Wawancara dengan Informan

Informan: P1

Pertanyaan: Bagaimana peningkatan kapasitas bagian perencanaan anggaran di Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik?

Jawaban: Peningkatan Kapasitas bagian perencanaan melalui training perencanaan yang disponsori oleh bagian Program dan Informasi, Ditjen P2P, tetapi training tidak selalu diadakan tiap tahun.

Pertanyaan: Hal apa saja yang dirasa masih sulit dalam menjalankan tugas sebagai perencana?

Jawaban: Yang menjadikan kesulitan atau kendala dalam perencanaan adalah minimnya data dukung atau referensi yang akan digunakan sebagai acuan perencanaan.

Pertanyaan: Hal apa saja yang belum sesuai dengan prosedur dalam perencanaan anggaran Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik?

Jawaban: Semua proses perencanaan sudah sesuai prosedur, sudah melalui mekanisme yang benar mulai dari membuat Jukren, Juknis ataupun Juklak, sampai di direview oleh PI, Itjen dan DJA Bappenas.

Pertanyaan: Bagaimana pembagian tugas perencanaan anggaran?

Jawaban: pembagiannya ada yang bertugas menyiapkan data dukung seperti membuat TOR, Spesifikasi, Referensi, membuat perhitungan anggaran sesuai SBM dan Menginput ke Aplikasi RKAKL.

Pertanyaan: Apakah petugas tetap atau berubah dari tahun ke tahun?

Jawaban: Relatif sama pertahun, rotasi dilakukan hampir tiap tiga tahun sekali.

Pertanyaan: Apa saja kendala perencanaan bila pejabat perencanaan sering berganti?

Jawaban: Kendalanya kadang perencanaan kegiatan suatu program tidak nyambung dari perencanaan sebelumnya, padahal kegiatan yang akan direncanakan kedepannya masih melanjutkan kegiatan sebelumnya.

Pertanyaan: Apa saja bentuk kegiatan integrasi perencanaan?

Jawaban: Meeting, Diskusi terkait perencanaan dengan Kelompok substansi yang lain se Direktorat.

Pertanyaan: Apa saja kendala dalam pelaksanaannya?

Jawaban: Kendalanya adalah team perencana mempunyai ego masing-masing dalam menentukan besaran anggaran yang sudah ditetapkan oleh PI

Pertanyaan: Apa faktor pendukung keberhasilan kegiatan integrasi?

Jawaban: Kebersamaan tujuan kegiatan dalam program.

Pertanyaan: Bagaimana adaptasi kegiatan perencanaan anggaran bila ada peraturan/ kebijakan baru?

Jawaban: Adaptasinya adalah tetap mengikuti aturan atau kebijakan yang berlaku, karena kalau tidak sesuai aturan akan menyebabkan masalah ketika pelaksanaan kegiatan maupun setelah pelaksanaan kegiatan.

Pertanyaan: Bagaimana sikap pejabat perencanaan anggaran untuk beradaptasi?

Jawaban: Menyesuaikan dengan SOP yang ada dalam perencanaan.

Pertanyaan: Apa saja kendala dalam beradaptasi?

Jawaban: Kendalanya adalah kadang peraturan berubah di tengah jalan, sehingga kita harus menyusun atau menginput rencana anggaran ke RKAKL ulang dari awal.

Pertanyaan: Bagaimana skill SDM bagian perencanaan?

Jawaban: Skill SDM perencanaan terutama berkaitan dengan teknologi Komputer sangat diperlukan, hal ini sangat mendukung perencana dalam melaksanakan tugasnya yang berhubungan erat dengan aplikasi dan Komputer.

Pertanyaan: Bagaimana kondisi sarana dan prasarana penunjang tugas perencanaan?

Jawaban: Sarana nya cukup memadai, tersedia laptop dan printer.

Pertanyaan: Apakah SOP tersedia dan memadai?

Jawaban: SOP yang berkaitan dalam perencanaan kadang tersedia atau ada ketika perencanaan sudah berjalan.

Pertanyaan: Bagaimana proses perencanaan hingga menjadi RKA-KL?

Jawaban: Proses Perencanaan dimulai dari penyiapan data2 (pencapaian indikator2 program) Membuat garis besar kegiatan, Membuat Jukren, Juknis, Juklak, Membuat TOR, membuat Detil kegiatan, Input ke RKAKL, Review oleh PI, Itjen, DJA, Pengesahan RKAKL.

Pertanyaan: Bagaimana kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan RKA-K/L?

Jawaban: Kadang terjadi ketidak sesuaian, hal ini disebabkan besaran anggaran di tentukan melalui SBM, sementara pada waktu pelaksanaan mengikuti kondisi yang ada pada waktu pelaksanaan kegiatan. Seperti misalnya harga tiket pesawat, waktu direncanakan menggunakan harga tiket pesawat GA, tetapi ketika pelaksanaan menggunakan pesawat yang lain, yang harganya lebih murah.

Pertanyaan: Apa saja kendala perencanaan RKA-K/L?

Jawaban: Kendalanya kadang susah dalam menginput kegiatan ke aplikasi RKAKL karena banyaknya kegiatan. Perangkat komputer juga harus diperhatikan kapasitas nya.

Informan: F2

Pertanyaan: Keberhasilan Kelompok substansi Filariasis dan Kecacingan dalam capaian output tahun 2017 sebesar 108.57% dan 140% tahun 2018 sebesar 104.80% dan 158.46% serta tahun 2019 sebesar 102.61% dan 152%. Mengapa tren capaian indikator jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi < 1% lebih besar dibanding capaian indikator jumlah kabupaten/ kota endemis yang melakukan POPM filariasis?

Jawaban: Indikator jumlah kab ko yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi <1% adalah pada kabupaten kota yang telah selesai melaksanakan popm filariasis selama min 5 tahun.

Pertanyaan: Bagaimana strategi penetapan indikator?

Jawaban: Strategi penetapan indikator dengan memperhatikan pentahapan penanggulangan filariasis di masing2 kab/kota.

Pertanyaan: Apa faktor pendukung keberhasilan capaian indikator tinggi?

Jawaban: Kab/kota berhasil mencapai cakupan minuman obat >65 % untuk memutus rantai penularan filariasis.

Pertanyaan: Bagaimana pembagian tugas perencanaan anggaran?

Jawaban: Menunjuk staf untuk menjadi pengelola anggaran di kelompok substansi.

Pertanyaan: Apakah petugas tetap atau berubah dari tahun ke tahun?

Jawaban: terdapat pergantian.

Pertanyaan: Apa saja kendala perencanaan bila pejabat perencanaan sering berganti?

Jawaban: Perlu waktu untuk beradaptasi atau mempelajari.

Pertanyaan: Bagaimana adaptasi kegiatan perencanaan anggaran bila ada peraturan/ kebijakan baru?

Jawaban: Pelaksanaan kegiatan tentunya harus menyesuaikan dengan aturan/kebijakan yang ada.

Pertanyaan: Bagaimana sikap pejabat perencanaan anggaran untuk beradaptasi?

Jawaban: Segera menginformasikan adanya aturan/kebijakan baru tersebut ke Subdit sehingga semua pelaksanaan kegiatan menyesuaikan.

Pertanyaan: Apa saja kendala dalam beradaptasi?

Jawaban: Apabila kebijakan baru langsung berlaku tanpa sosialisasi sebelumnya.

Informan: Pu1

Pertanyaan: Keberhasilan Kelompok substansi Filariasis dan Kecacingan dalam capaian output tahun 2017 sebesar 108.57% dan 140% tahun 2018 sebesar 104.80% dan 158.46% serta tahun 2019 sebesar 102.61% dan 152%. Mengapa tren capaian indikator jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi < 1% lebih besar dibanding capaian indikator jumlah kabupaten/ kota endemis yang melakukan POPM filariasis?

Jawaban: Karena cara perhitungan target indikator yang berbeda. Untuk target POPM Filariasis Karena sudah komitmen global maka perhitungan Targetnya adalah 100% daerah yang harus melaksanakan popm Filariasis pada tahun tertentu sesuai dg tahapan menuju eliminasi Filariasis. untuk POPM Filariasis sendiri tdk bersifat akumulatif untuk tahun berikutnya. Kemudian juga tdk memperhitungkan cakupan popm jika <65% Sedangkan untuk perhitungan mf rate Kita harus bisa memperhitungkan anggaran yang tersedia serta potensi kegagalan. Karena kegagalan suatu kab/Kota pada tahun tertentu akan berpengaruh kepada tahun selanjutnya, Karena capaian mf rate bersifat akumulatif.

Pertanyaan: Bagaimana strategi penetapan indikator?

Jawaban: Strategi perhitungan adalah dengan memperhatikan capaian indikator pada tahun tertentu berdasarkan peta tahapan menuju eliminasi Filariasis serta potensi kegagalan evaluasi yang akan terjadi.

Pertanyaan: Apa faktor pendukung keberhasilan capaian indikator tinggi?

Jawaban: komitmen dari pusat Dan daerah dalam mendukung Pelaksanaan POPM agar cakupan >65% sehingga dapat memutus penularan, Pelaksanaan advokasi, Sosialisasi, koordinasi, serta monitoring Dan evaluasi dalam rangka pencapaian target.

Pertanyaan: Bagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran?

Jawaban: Pertanggungjawaban Pelaksanaan tugas berjalan dengan baik. Semua tergantung dg komitmen dari pelaksana kegiatan, PUM serta PPK Dan bendahara dalam menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan. Karena uang muka yang terbatas, serta revolving menunggu penyelesaian spj uang muka yang beredar, sehingga proses reimburse membutuhkan waktu lebih. Ditambah dari beberapa pelaksana kegiatan yang tdk paham dg proses pencairan anggaran sehingga timbul gesekan², diperlukan PUM yang tegas Dan bisa menjelaskan dengan baik.

Pertanyaan: Bagaimana penyediaan data/ laporan anggaran bila diminta direktorat, PI, dll?

Jawaban: Data² yang diminta Direktorat biasanya Hanya data capaian output serta evaluasi capaian program Dan kegiatan. Sehingga bisa segera ditindaklanjuti. Untuk data capaian Realisasi anggaran menggunakan data dari bendahara berupa Realisasi anggaran yang sudah SP2D

Pertanyaan: Apa saja kendala direktorat terkait pertanggungjawaban/ penyediaan data/laporan anggaran?

Jawaban: pertanggungjawaban dari pelaksana kegiatan yang sudah mendapatkan uang muka dari bendahara tdk segera diselesaikan sehingga menghambat revolving anggaran yang berimbas pada perputaran uang muka Dan pembayaran spj reimburse

Pertanyaan: Bagaimana peningkatan kapasitas bagian PUM anggaran di Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik?

Jawaban: tdk ada pelatihan untuk PUM Direktorat. selama ini pum Hanya belajar dari pum² sebelumnya serta konsultasi ke PPK Dan bendahara terkait proses pertanggungjawaban kegiatan.

Pertanyaan: Hal apa saja yang dirasa masih sulit dalam menjalankan tugas sebagai PUM?

Jawaban: adanya tanggungjawab pekerjaan lainnya selain sebagai PUM sehingga harus bisa membagi waktu dg sebaik2nya serta gesekan2 dg pelaksana2 kegiatan yang tdk mau tau tentang proses pertanggungjawaban serta perputaran uang muka

Pertanyaan: Hal apa saja yang belum sesuai dengan prosedur dalam PUM anggaran Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik?

Jawaban: Adanya dualisme pekerjaan dimana diatas kertas pekerjaan utama adalah sebagai teknis tapi pada Pelaksanaannya pekerjaan utama adalah sebagai PUM.

Pertanyaan: Bagaimana pembagian tugas pengelola anggaran di Kelompok substansi nya?

Jawaban: Untuk membantu bandahara Dan PPK maka disetiap substansi dibentuk PUM sebagai pengelola anggaran masing2 substansi yang bertanggung jawab terhadap proses keuangan Dan pertanggungjawaban kegiatan

Pertanyaan: Apakah pengelola anggaran tetap atau berubah dari tahun ke tahun?

Jawaban: Untuk pejabat pengelola anggaran diusahakan tdk berubah dalam tahun berjalan Karena berpengaruh dg transfer knowledge serta perubahan sk yang harus diproses sampai kppn sehingga bisa menghambat proses pertanggungjawaban kegiatan Dan perputaran keuangan dalam Direktorat

Pertanyaan: Apa saja kendala bila pejabat pengelola anggaran sering berganti? Kepaduan

Jawaban: Kendala ada nya double pekerjaan baik sebagai teknis maupun pum sehingga menuntut pembagian tugas Dan waktu bisa dilaksanakan dg baik

Pertanyaan: Apa saja kegiatan integrasi dengan kelompok substansi lainnya?

Jawaban: kegiatan binwil P2P, untuk Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik binwilnya adalah sulsei, kegiatan program di integrasikan dg program yang lain. Kegiatan monitoring Dan evaluasi Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik terpadu

Pertanyaan: Apa saja kendala dalam pelaksanaannya?

Jawaban: Kendalanya untuk kegiatan terintegrasi waktunya terbatas Karena dibagi dg substansi yang lain sehingga perlu proses Persiapan yang matang. Karena melibatkan banyak substansi sehingga kadang terjadi miscom. Substansi lain membebankan tugas pada PIC kegiatan

Pertanyaan: Apa faktor pendukung keberhasilan kegiatan integrasi?

Jawaban: adanya perencanaan, Persiapan, serta koordinasi yang baik antara Plc kegiatan Dan substansi lainnya

Pertanyaan: Bagaimana adaptasi kegiatan pelaksanaan anggaran bila ada peraturan/ kebijakan baru?

Jawaban: Pelaksanaan anggaran Apbn untuk mengikuti peraturan adalah mutlak dilakukan sehingga jika Ada kebijakan baru maka harus segera dilaksanakan

Pertanyaan: Bagaimana sikap pejabat pengelola anggaran untuk mengimplementasikannya?

Jawaban: Karena peraturan bersifat mutlak sehingga kebijakan yang dibuat PPK harus dipatuhi. PPK akan segera mensosialisasikan kebijakan baru ke group pengelola anggaran

Pertanyaan: Apa saja kendala dalam implementasi?

Jawaban: Kendala dalam implementasi jika Ada kebijakan baru maka perlu waktu untuk bisa dimengerti oleh pelaksana kegiatan padahal aturan baru berlaku berdasarkan tanggal dikeluarkan aturan.

Informan: F1

Pertanyaan: Apakah indikator konsistensi RPD dalam pengelolaan anggaran, telah tersosialisasi dengan baik ke semua pegawai di unit terkait?

Jawaban: ya

Pertanyaan: Apakah waktu pelaksanaan kegiatan yang digunakan sama dengan waktu yang ditetapkan dalam RPD?

Jawaban: tidak selalu

Pertanyaan: Apa saja faktor pendukung konsistensi pelaksanaan anggaran dengan RPD?

Jawaban: Kesiapan bagian keuangan untuk mencairkan

Pertanyaan: Apa saja faktor penghambat/ kendala terkait pelaksanaan anggaran yang kurang konsisten terhadap RPD?

Jawaban: Adanya perubahan jadwal kegiatan

Pertanyaan: Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat terkait konsistensi RPD?

Jawaban: Mereschedule kembali waktu pelaksanaan

Pertanyaan: Apakah jumlah biaya yang dikeluarkan sama dengan standar biaya?

Jawaban: Ya untuk standard maksimal dan at cost

Pertanyaan: Apa saja faktor penyebab jumlah anggaran turun?

Jawaban: Adanya pemotongan anggaran

Pertanyaan: Apa saja faktor penghambat/ kendala realisasi anggaran terendah?

Jawaban: Pengadaan Barang dan Jasa yang tidak terlaksana, tdk optimal

Pertanyaan: Apa saja faktor pendukung sehingga realisasi anggaran tertinggi?

Jawaban: Kegiatan sesuai perencanaan, Proses PBJ lancar

Pertanyaan: Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat terkait jumlah anggaran?

Jawaban: Meminta arahan Pimpinan dan revisi kegiatan

Pertanyaan: Apakah output yang dihasilkan telah dimanfaatkan sebagaimana yang diharapkan?

Jawaban: Ya 80%

Pertanyaan: Apa saja faktor pendukung/ strategi/ inovasi mendapat capaian output tertinggi?

Jawaban: Koordinasi, sinkronisa dan integrasi kegiatan

Pertanyaan: Apa saja faktor penghambat capaian output rendah?

Jawaban: Kapasitas SDM, aturan yang kaku

Pertanyaan: Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat terkait output?

Jawaban: Pelatihan SDM, konsultasi pada unit terkait

Pertanyaan: Bagaimana kegiatan yang terdapat anggaran tapi tidak ada dalam indikator kinerja?

Jawaban: Tentu Kegiatan tersebut adalah kegiatan yang mendukung indikator kinerja.

Informan: V1

Pertanyaan: Bagaimana kegiatan anggaran di Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik?

Jawaban:

1. Anggaran disusun sesuai dg rencana, yang mana perencanaan disusun sesuai Tukelompok substansi organisasi (Substansi) dan sesuai permintaan daerah/ UPT (bottom up).
2. Anggaran dibelanjakan dg pengawasan internal yang mengacu padan ketentuan regulasi keuangan.
3. Penyerapan anggaran harus maksimal (diatas 95%) karena belanja anggaran untuk kepentingan program dan masyarakat.
4. Akuntabilitas anggaran harus dapat dipertanggung jawabkan serta dapat menjawab pertanyaan publik.
5. Anggaran berorientasi pada capaian kinerja organisasi (substansi).

Informan: Pu2

Pertanyaan: Keberhasilan Kelompok substansi Arbovirolos dalam capaian output tahun 2017 sebesar 130.72% tahun 2018 sebesar 122.62% dan tahun 2019 sebesar 93.84%. Mengapa capaian indikator program tahun 2019 rendah?

Jawaban: Pada tahun 2019 terjadi KLB DBD di 10 provinsi yang tersebar di 19 kab kota. Hal ini menjadi salah satu lenyebab tidak tercapainya indikator dbd. Didukung dg perubahan iklim yang terjadi dimana pada tahun 2019 memiliki musim hujan yang lebih panjang. Membuat bnyknya tmpt perindukan nyamuk aedes. Sehingga berpotensi menumbulkan peningkatan kasus. Hal ini juga dipengaruhi oleh psn 3m plus yang blm membudaya.

Pertanyaan: Apa saja faktor penghambat pencapaian indikator?

Jawaban:

- Bnyknya kab kota yang terjadi KLB
- Perubahan iklim
- Budaya PSN 3M Plus yang rendah
- Gerakan 1 rumah 1 jumentik blm dilksnkn di semua kab kota

- Dukungan pemerintah daerah dlm kegiatan pengendalian vektor dengue yang masih sangat rendah.

Pertanyaan: Bagaimana pelaksanaan pengelolaan anggaran mempengaruhi pencapaian indikator?

Jawaban: Ketepatan pencairan anggaran terutama utk investigasi maupun monitoring dan evaluasi dapat berpengaruh dlm tindak lanjut ke daerah utk penanggulangan klb maupun monitoring dan evaluasi.

Pertanyaan: Bagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran?

Jawaban: Pertanggungjawaban dapat diselesaikan 1 mg setelah kegiatan dilaksanakan.

Pertanyaan: Bagaimana penyediaan data/ laporan anggaran bila diminta direktorat, PI, dll?

Jawaban: Data disediakan dlm bentuk excel yang terdiri dari rekapitulasi anggaran, rekap ticket.

Pertanyaan: Apa saja kendala direktorat terkait pertanggungjawaban/ penyediaan data/laporan anggaran?

Jawaban:

- lamanya penyelesaian spj oleh pelaksana kegiatan
- tugas rangkap pum yang menjadi pengelola teknis program sehingga membatasi kegiatan pencatatan dan laporan kegiatan

Pertanyaan: Bagaimana peningkatan kapasitas bagian PUM anggaran di Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik?

Jawaban: Perlu adanya pelatihan atau OJT tentang kegiatan pum.

Pertanyaan: Hal apa saja yang dirasa masih sulit dalam menjalankan tugas sebagai PUM?

Jawaban: Adanya tugas rangkap sebagai pelaksana teknis program.

Pertanyaan: Hal apa saja yang belum sesuai dengan prosedur dalam PUM anggaran Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik?

Jawaban: Tidak ada penghitungan beban kerja dan pengelola. Anggaran di masing2 subDirektorat Sehingga disana rata-rata 1 subdit 1 pum.

Pertanyaan: Bagaimana pembagian tugas pengelola anggaran di Kelompok substansi nya?

Jawaban: Kelompok substansi ditentukan bergiliran utk semua staf setiap tahunnya

Pertanyaan: Apakah pengelola anggaran tetap atau berubah dari tahun ke tahun?

Jawaban: Berubah setiap tahun. Tetapi ada pengelola anggaran yang menjadi pum lbh dr 1 tahun

Pertanyaan: Apa saja kendala bila pejabat pengelola anggaran sering berganti?

Jawaban: Hrs mempelajari sistem dan mekanisme pengelolaan anggaran di kelompok substansi

Pertanyaan: Apa saja kegiatan integrasi dengan kelompok substansi lainnya?

Jawaban: Penge daluan vektor terutama ABJ atau angka bebas jentik

Pertanyaan: Apa saja kendala dalam pelaksanaannya?

Jawaban: Blm semua puskesmas melaporkan ABJ dlm aplikasi Santor (Sistem Surveilans vektor)

Pertanyaan: Apa faktor pendukung keberhasilan kegiatan integrasi?

Jawaban: Komunikasi dan Kerjasama

Pertanyaan: Bagaimana adaptasi kegiatan pelaksanaan anggaran bila ada peraturan/ kebijakan baru?

Jawaban: Melakukan revisi anggaran sesuai kebijakan atau peratiran yang baru

Pertanyaan: Bagaimana sikap pejabat pengelola anggaran untuk mengimplementasikannya?

Jawaban: Perlu mempelajari kebijakan yang baru

Pertanyaan: Apa saja kendala dalam implementasi?

Jawaban: Belum memahami kebijakan yang baru mr kurang atau blm mendpt bimbingan atau ojt.

Pertanyaan: Bagaimana dasar penetapan sehingga pagu anggaran turun secara drastis?

Jawaban: Ditentukan berdasarkan prioritas kegiatan nasional yang ditentukan oleh Roren dan PI

Pertanyaan: Apa saja kendala realisasi rendah pada tahun 2018 yaitu 85.99% dan tahun 2017 yaitu 87.30%?

Jawaban: Ditentukan berdasarkan prioritas kegiatan nasional yang ditentukan oleh Roren dan PI.

Pertanyaan: Bagaimana skill SDM bagian PUM?

Jawaban: Sdh cukup memadai mr cukup menguasai teknologi

Pertanyaan: Bagaimana kondisi sarana dan prasarana penunjang tugas PUM?

Jawaban: Perangkat komputer/laptop sgt terbatas.

Pertanyaan: Apakah SOP tersedia dan memadai?

Jawaban: Sop kurang memadai

Pertanyaan: Bagaimana penyusunan RPD?

Jawaban: Dibahas secara internak dlm penyusunan rdp

Pertanyaan: Apakah kegiatan terlaksana sesuai dengan RPD yang dibuat?

Jawaban: Tdk semua dpt terlaksana sesuai rdp

Pertanyaan: Apa saja kendala bila pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan RPD?

Jawaban: Kegiatan akan bertumpuk pada triwulan 4

Pertanyaan: Bagaimana proses perencanaan hingga menjadi RKA-KL?

Jawaban: Pembahasan rencana kegiatan baik dg roren, dja maupun pi

Pertanyaan: Bagaimana kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan RKA-K/L?

Jawaban: Pelaksanaan anggaran hrs sesuai rkakl kecuali jika ada efisiensi

Pertanyaan: Apa saja kendala perencanaan RKA-K/L?

Jawaban: Jumlah lokus n jumlah boya yang selalu berubah setiap saat

Lampiran 6. Dokumentasi Daftar Rekaman Wawancara



Gambar 22, 23, dan 24.
Perekaman wawancara dengan informan

Lampiran 7. Hasil Wawancara

Informan : M1
Satuan Kerja : Kelompok Substansi Malaria

No	ASPEK	Jawaban
1	Output Program	Faktor pendukung capaian output > 100% pada tahun 2017 – 2019 antara lain Malaria menjadi program prioritas nasional sehingga malaria mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk dukungan dana hibah; keterpaduan antara SDM dalam malaria; terdapat pola pikir yang sama tentang isu permasalahan
2	Stabilitas	Pembagian tugas pengelola anggaran dengan menugaskan seorang yang mempunyai kompetensi dalam perencanaan program untuk pengelolaan anggaran. Pengelola anggaran diganti tiap 2 tahun sekali, karena tidak ada staf yang khusus untuk pengelolaan anggaran pada tiap kelompok substansi.
3	Kepaduan	Kegiatan integrasi diantaranya pemantauan penggunaan kelambu berinsektisida dan pengelolaan pengendalian vektor. Kendala dalam integrasi adalah terkait kesepakatan menentukan waktu pelaksanaan kegiatan. Faktor pendukung keberhasilan integrasi adalah mempunyai kesamaan isu.
4	Keluwes	Menyesuaikan kebijakan yang baru dan melakukan revisi. Kendala dalam menyesuaikan tiap terdapat peraturan baru adalah dalam hal pengenalan metode dan perlu waktu untuk mempelajari terlebih dulu.
5	Proses Internal	Inspektorat Jenderal (Itjen) merupakan pendamping dalam hal pelaksanaan program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

		Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) hanya mengkonfirmasi saja pelaksanaan sesuai tidak dengan peraturan. Bila ada peraturan baru, BPK RI akan melakukan sosialisasi.
6	Jumlah anggaran dan realisasi	Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri (PHLN) dari Global Fund (GF) membuat kontrak selama 3 tahun. Dalam 3 tahun pembagian anggaran disesuaikan dengan target indikator per tahun. Anggaran PHLN lebih besar daripada APBN.
7	Kesesuaian	Penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) berdasarkan prioritas. Pelaksanaan anggaran sedikit meleset dari RPD. Kendala pelaksanaan anggaran bila tidak sesuai RPD adalah dengan menjadwal ulang.

Hasil Wawancara 2

Informan : V1
Satuan Kerja : Kelompok Substansi Pengendalian Vektor

No	ASPEK	Jawaban
1	Output Program	Anggaran berorientasi pada capaian kinerja kelompok substansi.
2	Kepaduan	Akuntabilitas anggaran seharusnya dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab pertanyaan publik.
3	Proses Internal	Anggaran dibelanjakan dengan pengawasan internal, mengacu ketentuan regulasi keuangan

4	Jumlah anggaran dan realisasi	Penyerapan anggaran seharusnya maksimal (> 95%) karena belanja anggaran untuk kepentingan program dan masyarakat.
5	Kesesuaian	Anggaran disusun sesuai dengan rencana, berdasarkan tukelompok substansi kelompok substansi dan permintaan daerah/ Unit Pelaksana Teknis (UPT) → Bottom up.

Hasil Wawancara 3

Informan : F1
Satuan Kerja : Kelompok Substansi Filariasis dan Kecacingan

No	ASPEK	Jawaban
1	Output Program	Capaian indikator menurunkan angka mikrofilaria rate selalu lebih tinggi, kemungkinan karena penetapan target 5 tahunan di bawah dari yang sebenarnya. Strategi penetapan indikator, dengan menyesuaikan antara target dengan kemampuan pelaksanaan anggaran saat itu. Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator tinggi adalah komitmen pemerintah sebagai prioritas nasional.
2	Stabilitas	Pembagian tugas pengelola anggaran disusun menggunakan Surat Keputusan (SK) oleh pimpinan, juga berdasarkan program yang ada di dalam kelompok substansi. Misal substansi Filariasis di bawah kepemimpinan Bu Ika dan Kecacingan di bawah kepemimpinan Bu Lusy. Pengelolaan anggaran tidak ada perubahan, yang ada hanya pergantian pelaksana/ Pemegang Uang Muka (PUM) tiap 3 tahun sekali.

		Kendala bila pejabat pengelola anggaran sering berganti maka pelaksanaan anggaran menjadi bermasalah dan menjadi tidak optimal karena harus beradaptasi/ belajar dulu.
3	Kepaduan	Belum ada bentuk integrasi dengan kelompok substansi lain.
4	Keluwes	Adaptasi kegiatan pelaksanaan anggaran bila ada peraturan baru proses menjadi agak terhambat karena harus dipahami dulu. Kebijakan menjadi terlambat dan adaptasi agak terhambat. Sikap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam menyikapi adalah implementasi harus sesuai aturan Kendala dalam implementasi adalah masing - masing pengelola anggaran misal Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berbeda pemahaman dalam implementasi kebijakan.
5	Proses Internal	Monitoring dan evaluasi Inspektorat Jenderal dilaksanakan mulai dari awal perencanaan dan rutin tiap tahun/ 1 periode anggaran. Monitoring dan evaluasi (Monitoring dan evaluasi) BPK RI dilaksanakan mulai dari pelaksanaan anggaran dan rutin tiap tahun/ 1 periode anggaran Kegiatan monitoring dan evaluasi Itjen sebelumnya dilakukan sosialisasi terlebih dulu, berbeda dengan BPK RI yang tanpa sosialisasi.
6	Jumlah anggaran dan realisasi	Pada tahun 2018 anggaran besar karena untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Schistosomiasis yang tinggi untuk roadmap. Schistosomiasis merupakan salah satu prioritas nasional, sehingga usulan anggaran lebih dipertimbangkan dan dipenuhi. Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik banyak kebutuhan surveilans, nilai lebih mahal sehingga Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) lebih tinggi.

		Dasar penetapan pagu anggaran dengan bilateral meeting, dari 3 kementerian yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kendala realisasi rendah pada tahun 2018 karena DAK Schistosomiasis ada yang ditunda.
7	Kesesuaian	Penyusunan RPD dilakukan di awal tahun sebagai jadwal/ panduan pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran sedikit berbeda dengan RPD, karena kadang - kadang perlu mengikuti jadwal daerah. Kendala yang dihadapi sehingga pelaksanaan anggaran tidak sama persis dengan RPD diantaranya karena pencairan anggaran yang banyak terkendala misal belum ada uang dll; mekanisme kurang fleksibel, sistem Langsung (LS) belum dijalankan padahal Uang Persediaan (UP) terbatas.

Hasil Wawancara 4

Informan : F2
Satuan Kerja : Kelompok Substansi Filariasis dan Kecacingan

No	ASPEK	Jawaban
1	Output Program	Indikator “jumlah kabupaten/ kota yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi <1%” adalah pada kabupaten kota yang telah selesai melaksanakan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) filariasis selama minimal 5 tahun. Sedangkan indikator “jumlah kabupaten/ kota endemis yang melakukan POPM

		filariasis” perbandingannya lebih kecil capaian cakupannya meskipun sebenarnya telah >100%, karena pelaksanaan POPM menggunakan dana operasional dari daerah yang membutuhkan komitmen kuat. Strategi penetapan indikator dengan memperhatikan pentahapan penanggulangan filariasis di masing - masing kabupaten/ kota Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator tinggi adalah kabupaten/ kota berhasil mencapai cakupan minuman obat >65 % untuk memutus rantai penularan filariasis.
2	Stabilitas	Pembagian tugas pengelola anggaran dengan menunjuk staf. Terdapat pergantian pengelola anggaran secara rutin, untuk pemerataan beban kerja. Kendala bila pengelola anggaran berganti – ganti adalah perlu waktu untuk beradaptasi atau mempelajari.
3	Keluwes	Pelaksanaan kegiatan tentunya harus menyesuaikan dengan peraturan/kebijakan yang ada Sikap pejabat pengelola anggaran untuk mengimplementasikan peraturan baru adalah dengan segera menginformasikan ke kelompok substansi sehingga semua pelaksanaan kegiatan menyesuaikan. Kendala dalam implementasi apabila kebijakan baru langsung berlaku tanpa sosialisasi sebelumnya.
4	Jumlah anggaran dan realisasi	Kendala realisasi rendah pada tahun 2018 karena adanya kegagalan proses pengadaan Brugia Rapid.
5	Kesesuaian	RPD disusun awal tahun. Sebagian besar pelaksanaan anggaran sesuai dengan RPD. Kendala bila tidak sesuai antara lain adanya kegagalan dalam proses pengadaan, diantaranya tahun 2018 dan 2019 ada kegagalan proses pengadaan Brugia. Untuk yang tahun 2019 kemudian dilakukan refocusing; proses pengadaan rata - rata telah diatas semester 2, sehingga sisa pengadaan tidak bisa dioptimalisasi.

Hasil Wawancara 5

Informan : Z2
Satuan Kerja : Kelompok Substansi Zoonosis

No	ASPEK	Jawaban
1	Output Program	Lima penyakit prioritas yang perlu dikendalikan sesuai epidemiologi adalah flu burung, rabies, antraks, leptospirosis, dan pes. Rabies adalah prioritas dalam indikator kinerja, perlu banyak lintas sektor termasuk Kementerian Pertanian dll yang punya andil, tetapi tidak semua bisa terkontrol karena masing – masing mempunyai program yang perlu dicapai. Rabies merupakan masalah di sektor hulu/ masalah hewan jika bisa teratasi/ bisa vaksinasi maka dampak ke manusia tidak ada. Seberapapun kuatnya Kemenkes untuk mengeliminasi jika hewan masih tertular rabies, akan susah dieliminasi. Dukungan rabies dengan “one health” berupa Komisi Nasional Zoonosis dibawah komando Kemenko PMK sangat bermakna, karena sekarang tidak ada lagi sehingga terjadi ketimpangan. Kemudian sebagai pengganti dibuatkan buku pedoman koordinasi, tetapi hanya sebagai pedoman saja. Faktor penghambat lainnya adalah kemampuan daerah seperti SDM, kondisi geografis, dan komitmen daerah.
2	Jumlah anggaran dan realisasi	Jumlah anggaran turun karena ketersediaan anggaran negara turun.
3	Kesesuaian	Penyusunan RPD pada awal tahun dengan membedah RKA-K/L dengan rapat kelompok substansi, kemudian menentukan penanggung jawab dan Menyusun time bond action plan. Pelaksanaan anggaran di awal tahun ada yang agak meleset dari RPD. Kendala antara lain pertanggungjawaban tidak sesuai dan anggaran kegiatan ada yang perlu menggunakan dana pribadi pegawai dulu.

Hasil Wawancara 6

Informan : A2
Satuan Kerja : Kelompok Substansi Arbovirolosis

No	ASPEK	Jawaban
1	Output Program	Faktor penghambat pencapaian indikator diantaranya SDM di daerah yang lemah, rotasi pegawai, anggaran minim, komitmen daerah kurang dan hanya mengandalkan pusat.
2	Kesesuaian	Tiap tahun Direktorat Jenderal Anggaran mensosialisasikan dengan baik ke setiap satuan kerja. Pelaksanaan anggaran sebagian tidak sesuai rencana karena DIPA akhir tahun pada tahun sebelumnya. Kendala diantaranya satuan kerja belum siap dalam mengelola keuangan terkait SDM/ kepanitiaan.

Hasil Wawancara 7

Informan : K1
Satuan Kerja : Sub Administrasi Umum

No	ASPEK	Jawaban
1	Output Program	Bentuk dorongan/ dukungan direktorat agar capaian output program para kelompok substansi tinggi dengan mempercepat proses pencairan dana, melakukan monitoring dan evaluasi masing - masing kelompok substansi. Target capaian output program minimal yang diharapkan dari para kelompok substansi >75%. Kendala capaian output kurang dari target diantaranya keterlambatan pencairan anggaran, kesiapan daerahnya, kendala pandemik.

2	Penyelesaian Tugas	Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tiap kelompok substansi secara umum sudah bagus, hanya kelompok substansi malaria yang terlambat sedikit tapi bisa dimaklumi/ wajar. Penyediaan data/ laporan anggaran tiap kelompok substansi bila diminta direktorat yang paling terlambat adalah kelompok substansi malaria, lainnya sesuai ketentuan waktu. Kendala direktorat terkait pertanggungjawaban anggaran tiap kelompok substansi adalah pertanggungjawaban tidak sesuai dengan petunjuk teknik. Juknis (SOP pertanggungjawaban perjalanan dinas) pernah dibuat sekitar tahun 2016 dan masih berlaku.
3	Revisi anggaran	Ketentuan frekuensi revisi anggaran adalah 2x Rata-rata frekuensi revisi anggaran tiap kelompok substansi 5x dalam 1 tahun. Pelaksanaan revisi anggaran untuk dapat melaksanakan anggarannya membutuhkan waktu sekitar 1-3 bulan
4	Stabilitas	Pembagian tugas pengelola anggaran urutannya permintaan kelompok substansi ke KPA, KPA disposisi Kasubbag adum, Kasubbag adum memerintahkan PPK operasional utk mencairkan anggaran kegiatan. Pengelola anggaran sering berubah. Kendala bila pejabat pengelola anggaran sering berganti yaitu pada awal saat pembuatan spesimen tanda tangan bank, perubahan dalam format di Surat Perjalanan Dinas (SPD).
5	Kepaduan	Bentuk kegiatan integrasi pada pelatihan entomolog kesehatan di Batam, semua informan dari masing - masing kelompok substansi. Kendala dalam pelaksanaannya pada jadwal pelaksanaan Faktor pendukung keberhasilan kegiatan integrasi adalah memperkaya pengetahuan peserta pertemuan.
6	Keluwes	Adaptasi kegiatan pelaksanaan anggaran bila ada peraturan baru adalah dengan menunggu sampai ada petunjuk arahan.

		Sikap pejabat pengelola anggaran untuk beradaptasi adalah dengan langsung otomatis menyesuaikan dengan peraturan baru yang berlaku. Kendala dalam beradaptasi diantaranya PUM sering melakukan kesalahan dokumentasi pertanggungjawaban.
7	Proses Internal	Monitoring dan evaluasi Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun, per semester/ 2x pemeriksaan, dan langsung ke direktorat. Monitoring dan evaluasi BPK 1x setahun di akhir tahun. Monitoring dan evaluasi tersebut bersifat mendidik dan berupa pembinaan. Sebelum pelaksanaan terdapat sosialisasi dari DJA dan direktorat jenderal perbendaharaan.
		Minimal realisasi anggaran yang dianggap bagus/ efisien adalah 70% Dukungan direktorat agar realisasi anggaran tiap kelompok substansi tinggi adalah dengan membantu proses realisasi PBJ, dan hal tersebut sangat signifikan. Kendala bila realisasi anggaran rendah diantaranya PBJ tidak terrealisasi.
8	Kesesuaian	Pelaksanaan RKA-K/L tiap kelompok substansi harus sesuai jadwal. Tapi pada pelaksanaan biasanya tidak sesuai jadwal karena perlu menyesuaikan jadwal pimpinan. Misal kegiatan dengan Menteri, tiba-tiba waktu harus digeser, padahal ada kegiatan lain yang sudah terjadwal. Kesesuaian pertanggungjawaban dengan RKA-K/L tiap kelompok substansi hanya kelompok substansi Malaria yang tidak sesuai, karena mencampurkan GF dengan APBN. Kendala pelaksanaan akun-akun RKA-K/L adalah ketidaksesuaian keinginan pimpinan dengan akun yang ada di RKA KL.

Hasil Wawancara 8

Informan : P1
Satuan Kerja : Perwakilan Perencanaan Anggaran

No	ASPEK	Jawaban
1	Stabilitas	Peningkatan Kapasitas bagian perencanaan melalui training perencanaan yang disponsori oleh bagian Program dan Informasi, Ditjen P2P, tetapi training tidak selalu diadakan tiap tahun. Hal yang menjadikan kesulitan atau kendala dalam perencanaan adalah minimnya data dukung atau referensi yang akan digunakan sebagai acuan perencanaan. Hal yang belum sesuai dengan prosedur dalam perencanaan anggaran Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik adalah tidak ada karena semua proses perencanaan sudah sesuai prosedur, sudah melalui mekanisme yang benar mulai dari membuat Jukren, Juknis ataupun Juklak, sampai di direview oleh PI, Itjen dan DJA Bappenas.
2	Struktur organisasi tugas/ pejabat/ pengelola anggaran dari waktu ke waktu	Pembagian tugas perencanaan anggaran ada yang bertugas menyiapkan data dukung seperti membuat TOR, Spesifikasi, Referensi, membuat perhitungan anggaran sesuai SBM dan Menginput ke Aplikasi RKAKL Petugas relatif sama pertahun, rotasi dilakukan rutin tiap tiga tahun sekali. Kendala perencanaan bila pejabat perencanaan sering berganti adalah kadang perencanaan kegiatan suatu program tidak menyambung dari perencanaan sebelumnya, padahal kegiatan yang akan direncanakan kedepannya masih melanjutkan kegiatan sebelumnya.
3	Kepaduan	Bentuk kegiatan integrasi perencanaan diantaranya meeting untuk berdiskusi terkait perencanaan dengan Kelompok substansi lain se Direktorat. Kendala dalam pelaksanaannya adalah tim perencana mempunyai ego masing-masing dalam menentukan besaran anggaran yang sudah di tetapkan oleh PI. Faktor pendukung keberhasilan kegiatan integrasi yaitu kebersamaan tujuan kegiatan dalam program.

4	Keluwesan	Adaptasi kegiatan perencanaan anggaran bila ada peraturan baru adalah tetap mengikuti aturan atau kebijakan yang berlaku, karena kalau tidak sesuai aturan akan menyebabkan masalah ketika pelaksanaan kegiatan maupun setelah pelaksanaan kegiatan. Sikap pejabat perencanaan anggaran untuk beradaptasi yaitu menyesuaikan dengan SOP yang ada dalam perencanaan. Kendala dalam beradaptasi diantaranya kadang peraturan berubah di tengah jalan, sehingga harus menyusun atau menginput rencana anggaran ke RKAKL ulang dari awal.
5	Proses Internal	Skill SDM bagian perencanaan terutama berkaitan dengan teknologi Komputer sangat diperlukan, hal ini sangat mendukung perencana dalam melaksanakan tugasnya yang berhubungan erat dengan aplikasi dan Komputer. Kondisi sarana dan prasarana penunjang tugas perencanaan cukup memadai, tersedia laptop dan printer. SOP yang berkaitan dalam perencanaan kadang tersedia atau ada ketika perencanaan sudah berjalan.
6	Kesesuaian	Proses perencanaan hingga menjadi RKA-K/L dimulai dari penyiapan data - data (pencapaian indikator - indikator program); membuat garis besar kegiatan; membuat Jukren, Juknis, Juklak; membuat TOR; membuat Detil kegiatan; menginput ke RKA-K/L; review oleh PI, Itjen, DJA; dan pengesahan RKA-K/L. Pelaksanaan anggaran dengan RKA-K/L kadang terjadi ketidak sesuaian, hal ini disebabkan besaran anggaran di tentukan melalui SBM, sementara pada waktu pelaksanaan mengikuti kondisi yang ada pada waktu pelaksanaan kegiatan. Seperti misalnya harga tiket pesawat, waktu direncanakan menggunakan harga tiket pesawat GA, tetapi ketika pelaksanaan menggunakan pesawat yang lain, yang harganya lebih murah. Kendala perencanaan RKA-K/L adalah kadang susah dalam menginput kegiatan ke aplikasi RKA-K/L karena banyaknya kegiatan. Perangkat komputer juga harus diperhatikan kapasitas nya.

Hasil Wawancara 9

Informan : Pu1
Satuan Kerja : Perwakilan PUM

No	ASPEK	Jawaban
1	Output Program	Capaian indikator mf rate lebih tinggi daripada POPM karena cara perhitungan target indikator yang berbeda. Untuk target POPM Filariasis Karena sudah komitmen global maka perhitungan targetnya adalah 100% daerah yang harus melaksanakan POPM Filariasis pada tahun tertentu sesuai dengan tahapan menuju eliminasi Filariasis, dan untuk POPM Filariasis tidak bersifat akumulatif untuk tahun berikutnya, juga tidak memperhitungkan cakupan POPM jika <65%. Sedangkan untuk mf rate perlu memperhitungkan anggaran yang tersedia serta potensi kegagalan, karena kegagalan suatu kabupaten/ kota pada tahun tertentu akan berpengaruh kepada tahun selanjutnya, dan capaian mf rate bersifat akumulatif. Strategi penetapan indikator berdasarkan peta tahapan menuju eliminasi Filariasis serta potensi kegagalan evaluasi yang akan terjadi. Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator tinggi adalah komitmen dari pusat dan daerah dalam mendukung Pelaksanaan POPM agar cakupan >65% sehingga dapat memutus penularan; pelaksanaan advokasi, sosialisasi, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target
2	Penyelesaian Tugas	Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran berjalan dengan baik. Semua tergantung pada komitmen dari pelaksana kegiatan, PUM serta PPK dan bendahara dalam menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan. Karena uang muka yang terbatas, serta revolving menunggu penyelesaian pertanggungjawaban uang muka yang beredar, sehingga proses reimburse membutuhkan waktu lebih. Ditambah dari beberapa pelaksana kegiatan yang

		tidak paham dengan proses pencairan anggaran sehingga timbul gesekan - gesekan, diperlukan PUM yang tegas dan bisa menjelaskan dengan baik. Penyediaan data/ laporan anggaran yang diminta direktorat biasanya hanya data capaian output serta evaluasi capaian program dan kegiatan, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Untuk data capaian realisasi anggaran menggunakan data dari bendahara berupa realisasi anggaran yang telah SP2D Kendala terkait pertanggungjawaban dari pelaksana kegiatan yang telah mendapatkan uang muka dari bendahara tidak segera diselesaikan sehingga menghambat revolving anggaran yang berimbas pada perputaran uang muka dan pembayaran anggaran reimburse
3	Stabilitas	Penigkatan kapasitas bagian PUM anggaran di Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik tidak ada pelatihan. selama ini PUM hanya belajar dari para PUM sebelumnya serta konsultasi ke PPK dan bendahara terkait proses pertanggungjawaban kegiatan Kesulitan dalam menjalankan tugas sebagai PUM adalah adanya tanggungjawab pekerjaan lainnya selain sebagai PUM sehingga harus bisa membagi waktu dengan sebaik - baiknya serta gesekan - gesekan dengan para pelaksana anggaran yang tidak mau tau tentang proses pertanggungjawaban serta perputaran uang muka Hal - hal yang belum sesuai dengan prosedur dalam PUM anggaran Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik adalah adanya dualisme pekerjaan dimana diatas kertas pekerjaan utama adalah sebagai teknis tapi pada pelaksanaannya pekerjaan utama adalah sebagai PUM.
4	Struktur organisasi tugas/ pejabat/ pengelola anggaran dari waktu ke waktu	Pembagian tugas pengelola anggaran adalah membantu bendahara dan PPK maka disetiap substansi dibentuk PUM sebagai pengelola anggaran masing2 substansi yang bertanggung jawab terhadap proses keuangan Dan pertanggungjawaban kegiatan

		Pejabat pengelola anggaran diusahakan tidak berubah dalam tahun berjalan Karena berpengaruh dengan transfer pengetahuan serta perubahan Surat Keputusan (SK) yang harus diproses hingga KPPN sehingga dapat menghambat proses pertanggungjawaban kegiatan dan perputaran keuangan dalam Direktorat. Kendala ada nya double pekerjaan baik sebagai teknis maupun PUM sehingga menuntut pembagian tugas dan waktu bisa dilaksanakan dengan baik.
5	Kepaduan	kegiatan integrasi diantaranya kegiatan binwil P2P, untuk Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik binwilnya adalah sulsel, kegiatan program di integrasikan dengan program yang lain. Kegiatan monitoring dan evaluasi Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik terpadu. Kendalanya untuk kegiatan terintegrasi waktunya terbatas karena dibagi dengan substansi yang lain sehingga perlu proses persiapan yang matang. Juga melibatkan banyak substansi sehingga kadang terjadi kesalahpahaman. Substansi lain membebankan tugas pada PIC kegiatan. Faktor pendukung antara lain adanya perencanaan, persiapan, serta koordinasi yang baik antara PiC kegiatan dan substansi lainnya.
6	Keluwes	Pelaksanaan anggaran APBN untuk mengikuti peraturan adalah mutlak dilakukan sehingga jika Ada kebijakan baru maka harus segera dilaksanakan Karena peraturan bersifat mutlak sehingga kebijakan yang dibuat PPK harus dipatuhi. PPK akan segera mensosialisasikan kebijakan baru ke group pengelola anggaran Kendala dalam implementasi jika ada kebijakan baru maka perlu waktu untuk bisa dimengerti oleh pelaksana kegiatan padahal aturan baru berlaku berdasarkan tanggal dikeluarkan aturan.
7	Jumlah anggaran dan realisasi	Kendala realisasi rendah tahun 2018 adalah karena PBJ gagal lelang di akhir tahun sehinggasusah revisi.

8	Kesesuaian	Pelaksanaan anggaran ada yang mundur/ tidak sesuai dengan RPD. Kendala nya adalah bentrok dengan jadwal kegiatan lain; kegiatan ada yang membutuhkan alat padahal PBJ mundur sehingga kegiatan juga ikut mundur; serta factor X yang tidak bisa diprediksi.
---	-------------------	--

Hasil Wawancara 10

Informan : Pu2
Satuan Kerja : Perwakilan PUM

No	ASPEK	Jawaban
1	Output Program	Capaian indikator program tahun 2019 agak rendah karena terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue (DBD) di 10 provinsi yang tersebar di 19 kabupaten/ kota. Hal ini menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya indikator DBD. Didukung dengan perubahan iklim yang terjadi dimana pada tahun 2019 memiliki musim hujan yang lebih Panjang, membuat banyaknya tempat perindukan nyamuk Aedes, sehingga berpotensi menumbulkan peningkatan kasus. Hal ini juga dipengaruhi oleh Pemberantasan Sarang Nyamuk dengan Mengubur barang bekas; menutup dan menguras bak mandi dan memakai repellent (PSN 3M plus) yang belum membudaya. Faktor penghambat pencapaian indikator diantaranya banyaknya kabupaten/ kota yang terjadi KLB; perubahan iklim; budaya PSN 3M Plus yang rendah; gerakan 1 rumah 1 jumantik belum dilaksanakan di semua kabupaten/ kota; serta

		dukungan pemerintah daerah dalam kegiatan pengendalian vektor dengue yang masih sangat rendah. Ketepatan pencairan anggaran terutama untuk investigasi maupun monitoring dan evaluasi dapat berpengaruh dalam tindak lanjut ke daerah untuk penanggulangan KLB maupun monitoring dan evaluasi.
2	Penyelesaian Tugas	Pertanggungjawaban dapat diselesaikan 1 minggu setelah kegiatan dilaksanakan. Data disediakan dalam bentuk excel yang terdiri dari rekapitulasi anggaran dan rekap ticket. Kendala direktorat antara lain lamanya penyelesaian pertanggungjawaban oleh pelaksana kegiatan; tugas rangkap PUM yang menjadi pengelola teknis program sehingga membatasi kegiatan pencatatan dan pelaporan kegiatan.
	Stabilitas	
3	Peningkatan kapasitas	Perlu adanya pelatihan atau On the Job Training (OJT) tentang kegiatan PUM Kesulitan dalam menjalankan tugas sebagai PUM adalah adanya tugas rangkap sebagai pelaksana teknis program. Hal – hal yang belum sesuai dengan prosedur dalam PUM anggaran Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik adalah tidak ada penghitungan beban kerja dan pengelolaan anggaran dari masing - masing kelompok substansi (Kelompok substansi), sehingga disama ratakan 1 Kelompok substansi 1 orang PUM.
4	Struktur organisasi tugas/ pejabat/ pengelola anggaran dari waktu ke waktu	Pembagian tugas pengelola anggaran ditentukan bergiliran utk semua staf setiap tahunnya Pengelola anggaran berubah setiap tahun, tetapi ada pengelola anggara yang menjadi PUM lebih dari 1 tahun

		Kendala bila pejabat pengelola anggaran sering berganti maka harus mempelajari sistem dan mekanisme pengelolaan anggaran.
5	Kepaduan	Kegiatan integrasi diantaranya pengendalian vektor terutama Angka Bebas Jentik (ABJ) Kendala dalam pelaksanaannya adalah belum semua puskesmas melaporkan ABJ ke dalam aplikasi Sistem Surveilans vektor (Santor) Faktor pendukung keberhasilan kegiatan integrasi adalah komunikasi dan Kerjasama.
6	Keluwes	Adaptasi kegiatan pelaksanaan anggaran bila ada peraturan baru adalah melakukan revisi anggaran sesuai peraturan yang baru Sikap pejabat pengelola anggaran untuk mengimplementasikannya adalah perlu mempelajari kebijakan yang baru Kendala dalam implementasi yaitu belum memahami kebijakan yang baru karena kurang atau belum mendapat bimbingan atau OJT.
	Proses Internal	
7	Input (SDM terampil, perangkat komputer yang berfungsi baik, Standard Operating Procedure (SOP)) yang tersedia	Skill SDM bagian PUM telah cukup memadai dan cukup menguasai teknologi Kondisi sarana dan prasarana penunjang tugas PUM yakni perangkat komputer/ laptop sangat terbatas. Sop kurang memadai.
8	Jumlah anggaran dan realisasi	Kisaran perbandingan alokasi anggaran untuk operasional dibanding pengadaan barang dan jasa ditentukan berdasarkan prioritas kegiatan nasional yang ditentukan oleh Roren dan PI

		Kendala realisasi rendah pada tahun 2018 yaitu 85.99% dan tahun 2017 yaitu 87.30% karena ada kegiatan besar dimana ticket kegiatan terlalu murah; dan ada proses pengadaan yang gagal lelang.
	Kesesuaian	
9	Rencana Penarikan Dana	Penyusunan RPD dibahas secara internal. Pelaksanaan anggaran tidak semua dapat terlaksana sesuai RPD Kendala bila pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan RPD maka kegiatan akan bertumpuk pada triwulan 4.
10	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L)	Proses perencanaan hingga menjadi RKA-K/L yaitu pembahasan rencana kegiatan baik dengan Biro Perencanaan, DJA maupun Program dan Informasi Direktorat Jenderal P2P. Pelaksanaan anggaran harus sesuai RKA-K/L kecuali jika ada efisiensi Kendala perencanaan RKA-K/L adalah jumlah lokus dan jumlah biaya yang selalu berubah setiap saat.

Hasil Wawancara 11

Informan : B1
Satuan Kerja : Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

No	ASPEK	Jawaban
1	Efisiensi	Tidak ada persentase perkiraan capaian input dalam pengelolaan anggaran. Kriteria dibuat oleh pemerintah dalam Permenkeu, Permenkes, dll. Pada PBJ yang dinilai kualitas, kuantitas, harga, waktu. Kualitasnya apakah cukup atau tidak, sesuai atau tidak dengan saat perjanjian. Kualitas apakah telah sesuai dengan spesifikasi di awal. Waktu pengiriman harus ditepati, bila terlambat terkena denda. Output harus sesuai dengan kontrak indikator sebesar 100%.
2	Penyelesaian Tugas	Penilaian terhadap pertanggungjawaban anggaran kementerian menggunakan audit kinerja terkait ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. DIPA disampaikan ke BPK RI berupa soft file atau sesuai kebutuhan. Ketidaksesuaian hasil audit dapat dilihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
3	Proses Internal	Mekanisme monitoring dan evaluasi BPK RI adalah setelah memeriksa maka akan diberikan rekomendasi, dan akan memantau apakah rekomendasi telah dijalankan. Bagian Itjen yang berkepentingan, yang akan melapor ke BPK. BPK lebih sebagai auditor eksternal/ post audit dari Itjen. Penilaian masing – masing kinerja satuan kerja eselon 2 fokus ke internal auditor.

Hasil Wawancara 12

Informan : N1
Satuan Kerja : Perwakilan Non-Government Organization (NGO)

No	ASPEK	Jawaban
1	Keluwesannya	Mulai berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sejak tahun 2011 menangani penyakit kecacingan hingga tahun 2019. Kemudian sejak tahun 2019 beralih menangani penyakit filariasis. Merupakan sesuatu yang mudah dalam memahami peraturan kolaborasi pelaksanaan anggaran di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. NGO sebagai project yang mengambil donor dari USAID, untuk mengisi gap anggaran yang tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan program dan untuk meningkatkan mutu. Kendala dalam implementasi adalah cara untuk meyakinkan atau membuat mengerti pada donor di Washington akan kebutuhan di Indonesia.

Hasil Wawancara 13

Informan : Ak1
Satuan Kerja : Perwakilan Akademisi

No	ASPEK	Jawaban
1	Kepaduan	Keterkaitan kegiatan antara Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik dengan akademisi adalah terkait pelatihan ketrampilan diagnostic atau sebagai informan ahli. Kolaborasi program diantaranya kecacingan, filariasis, malaria, vektor control vektor filariasis dengan evaluasi potensi vektor, zoonosis dengan laboaratorium mikrobiologi, dan arbovirosis yang terkait vektornya. Frekuensi kolaborasi dalam 1 periode anggaran sekitar 4x. Kendala yang dihadapi adalah dokumen pertanggungjawaban APBN lebih rumit mengingat departemen parasitologi sebenarnya tidak untuk bisnis. Berbeda dengan pertanggungjawaban bila menggunakan pihak ketiga atau NGO atau anggaran donor, dimana lebih sederhana dan mudah.

Lampiran 8. Gambar-Gambar

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017

KEMEN/LEMB : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG : (05) DITJEN Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 UNIT KERJA : (465842) DIREKTORAT Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
 ALOKASI : Rp. 205.502.166.000

Halaman : 7

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2017			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Paket Meeting Fullboard [42 OR x 2 OH]	84,00 OH	600.000	50.400.000	
				50.400.000	RM
	- Transport Lokal [42 OR x 1 TR]	42,00 TR	150.000	6.300.000	
				6.300.000	RM
	> Narasumber			57.456.000	
	- Uang Harian [4 OR x 3 OH]	12,00 OH	180.000	2.160.000	
				2.160.000	RM
	- uang harian [4 OR x 2 OH]	8,00 OH	180.000	1.440.000	
				1.440.000	RM
	- Paket Meeting Fullboard [8 OR x 2 OH]	16,00 OH	600.000	9.600.000	
				9.600.000	RM
	- Transport (PP) [8 OR x 1 TR]	8,00 TR	5.532.000	44.256.000	
				44.256.000	RM
B	Reff 52 PPM (public private mix) workshop for system strengthening			369.024.000	
521211	Belanja Bahan			2.000.000	HLL
	(KPPN.140-KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH / Reg.71097101)				
	- ATK [1 PT x 1 SET]	1,00 PT	2.000.000	2.000.000	
				2.000.000	RM
522151	Belanja Jasa Profesi			10.200.000	HLL
	(KPPN.140-KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH / Reg.71097101)				
	- Honor Moderator [3 OR x 1 JPL]	3,00 OJ	700.000	2.100.000	
				2.100.000	RM
	- Honor Narasumber [9 OR x 1 JPL]	9,00 OJ	900.000	8.100.000	
				8.100.000	RM
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			356.824.000	HLL
	(KPPN.140-KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH / Reg.71097101)				
	> Peserta Pusat			97.200.000	
	- Uang Harian [36 OR x 4 OH]	144,00 OH	150.000	21.600.000	
				21.600.000	RM
	- Paket Meeting Fullboard [36 OR x 3 OH]	108,00 OH	650.000	70.200.000	
				70.200.000	RM

Gambar 1.

Dana hibah untuk Kelompok Substansi Malaria yang tertuang dalam RKA-K/L sebagai komitmen dari faktor pendukung

POLITEKNIK
 STIA LAN
 JAKARTA



Gambar 2.

KLB DBD tahun 2019 sebagai salah satu penghambat capaian output program kurang



Gambar 3.
Pemeriksaan BMN



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL**

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon (021) 4247608 (*Hunting*) Faksimile (021) 4207807



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN
ZOOTIK**

NOMOR: HK.01.08/6/ 7 /2019

TENTANG

**PENUNJUKAN STAF PENGELOLA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
TULAR VEKTOR DAN ZOOTIK
TAHUN ANGGARAN 2019**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN
ZOOTIK**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 5 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu ditetapkan Staf Pengelola Anggaran;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Staf Pengelola Anggaran satuan kerja Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Tular Vektor dan Zoonotik Tahun Anggaran 2019 dengan keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

**Gambar 4.
SK PUM**



Gambar 5.
Integrasi Kelompok Substansi Malaria



Gambar 6.
Integrasi P2PTVZ



Gambar 7.
Integrasi Bagian Perencanaan



Gambar 8.
Integrasi Binwil



Gambar 9.
Integrasi Pengendalian Vektor





Gambar 10 dan 11.
Kolaborasi dengan akademisi



Gambar 12.
Kolaborasi dengan NGO



Gambar 13.
Penilaian oleh Itjen saat Perencanaan

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A



Gambar 14.
Monitoring dan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal dan BPK

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A



Gambar 15.
Sarana dan Prasarana yang masih terbatas



Gambar 16.
Rapat Penyusunan RPD 1

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A



Gambar 17.
Rapat Penyusunan RPD 2



Gambar 18.
Rapat Penyusunan RPD 3

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A